

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN

(Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

REVA ALFIANA ANNISA W

NIM. 155030107111018



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN

(Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

REVA ALFIANA ANNISA W

NIM. 155030107111018



DOSEN PEMBIMBING:

1. Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP
2. Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

-HADAPI DAN JALANI-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Disusun oleh : Reva Alfiana Annisa W

NIM : 155030107111018

Fakultas : Ilmu Administrasi

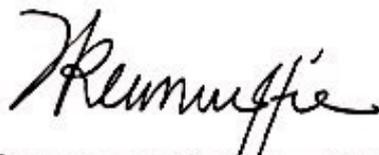
Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

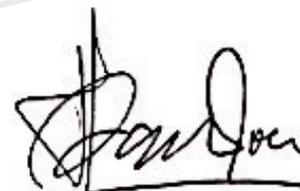
Malang, 06 Mei 2019
Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP
NIP. 19770101200502 2 001



Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP
NIP. 201107850212141001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2019
Pukul : 12.00-13.00
Skripsi atas nama : Reva Alfiana Annisa W
Judul : Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

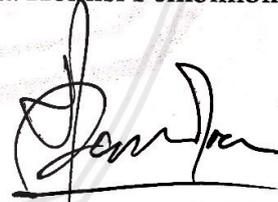
Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP
NIP. 19770101200502 2 001

Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP
NIP. 201107851214 1 000

Anggota Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Hermawan, S.IP., M.Si
NIP. 19720405200312 1 001

Aulia Puspaning Galih, S.IP., M.S
NIP. 201607910120 2 001

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 03 Mei 2018

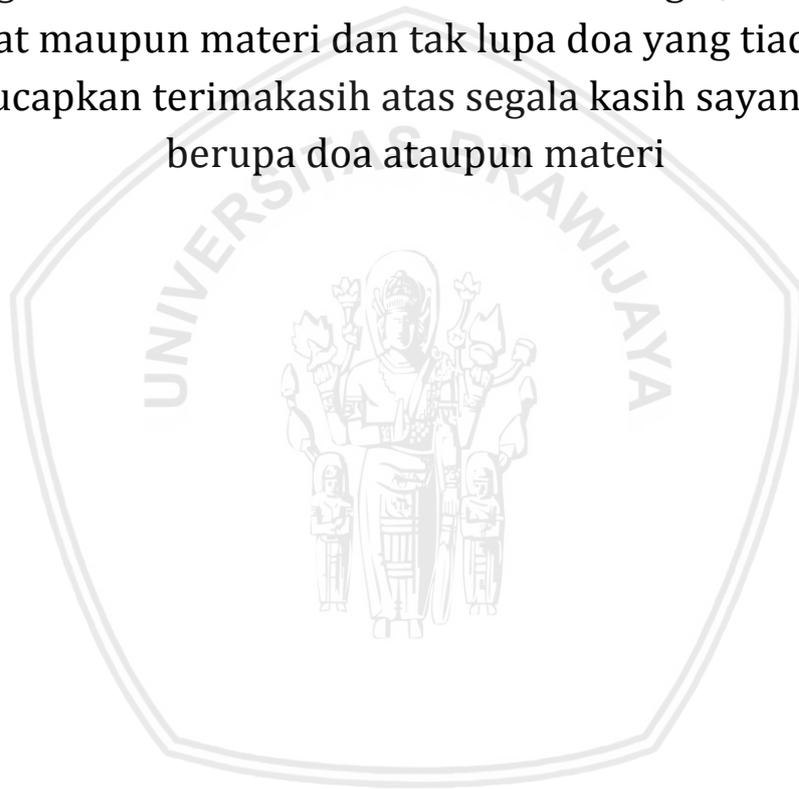


Reva Alfiana Annisa W
NIM. 155030107111018

Ku persembahkan karya ini untuk kedua orangtuaku :

Bapak Triyanto & Ibu Siti Nurilah

Yang terus menerus memberikan semangat, motivasi,
nasihat maupun materi dan tak lupa doa yang tiada henti
kuucapkan terimakasih atas segala kasih sayangnya
berupa doa ataupun materi



RINGKASAN

Reva Alfiana Annisa W, 2019, **PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MALANG)**, Ketua Komisi Pembimbing Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, Anggota Komisi Pembimbing Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP, 112 Halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pertama, pemberdayaan usaha mikro dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang dan kedua, dampak pemberdayaan usaha mikro dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif fokus penelitian, yaitu : (1) Proses pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal pokok, yaitu : Mengembangkan (*Enabling*), Memberdayakan (*Empowering*), Melindungi (*Protecting*). (2) Dampak pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro untuk mengurangi tingkat pengangguran. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis meliputi proses yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berhasil dalam menyelenggarakan pelatihan, *display* UKM, Klinik Bisnis, dan Paguyuban UKM sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. (2) dampak pemberdayaan usaha mikro meliputi peningkatan pendidikan (*knowledge*) yaitu menjadikan masyarakat lebih mengetahui pengetahuan lebih luas, peningkatan kapasitas (*capacity*) yaitu memperbaiki pendapatan masyarakat, dan peningkatan kemandirian (*indepedency*) yaitu menjadikan masyarakat lebih mandiri. Saran yang dapat peneliti berikan antara lain : (1) melakukan pendataan agar pemberdayaan usaha mikro tepat sasaran, (2) pemantauan program klinik bisnis, (3) adanya perhatian khusus bagi usaha mikro untuk mencegah eksploitasi dan persaingan yang tidak seimbang.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Mikro, Perkotaan.

SUMMARY

Reva Alfiana Annisa W, 2019, **EMPOWERMENT OF MICRO BUSINESS IN ORDER TO REDUCE THE LEVEL OF UNEMPLOYMENT (STUDY AT MALANG CITY COOPERATIVE AND MICRO BUSINESSES OFFICE)**, Chairman of The Advisory Commission Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP, Member of The Advisory Commission of Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP, 112 Pages

This study aims to describe, and analyze the first, empowerment of micro business in reducing unemployment in Malang City and secondly, the impact of micro-business empowerment in reducing unemployment in Malang City.

This research is a descriptive study with a qualitative approach focusing on research, namely: (1) The process of community empowerment includes three main things, namely: Enabling, Empowering, Protecting. (2) The impact of community empowerment through micro-enterprises to reduce unemployment. Data obtained through observation, interviews, documentation in the field. While the analysis of the data used is analysis including the process of collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results showed that: (1) Malang City Cooperative and Micro Business Office succeeded in organizing training, SME displays, Business Clinics, and SME Societies as an alternative to reduce the unemployment rate. (2) the impact of empowerment of micro-enterprises includes improving knowledge, which makes the community more knowledgeable about knowledge, capacity building namely improving community income, and increasing independency which makes the community more independent. Suggestions that can be given by the researcher include: (1) conducting data collection so that micro business empowerment is on target, (2) monitoring business clinical programs, (3) special attention for micro-enterprises to prevent exploitation and unbalanced competition.

Keywords: Empowerment, Micro Business, Cities.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran (Studi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mahasiswa S1 untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan pada Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan dan dukungannya yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik;
3. Bapak Dr. Fadhillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Publik;
4. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP dan Bapak Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP selaku Komisi Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi;

5. Ibu Sri Wedarti selaku Ketua Perlindungan Usaha Mikro Kota Malang yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan;
6. Pihak Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data dan merespon dengan cepat;
7. Sahabat di Malang, Anita, Ayu, Vira, Erni, Regina, Nabila, Ucun, Wildhan, Sugeng, Afar dan Ebil yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir dan canda tawa selama di Malang;
8. Sahabat penulis, Fadhil Aflah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir;
9. Sahabat SMA yaitu Arin, Astria, Fatiha Ayu, Laiza, Galuh dan Tasya yang selalu memberi semangat selama masa skripsi ;
10. Sahabat Kost bunga kumis kucing, Tami, Tia, dan Ka Dian yang selalu memberikan dukungan semangat sehingga penulisan skripsi selesai;

Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak

yang membutuhkan.

Malang, Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.	i
MOTTO.	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.	vi
RINGKASAN.	vii
SUMMARY.	viii
KATA PENGANTAR.	ix
DAFTAR ISI.	xii
DAFTAR TABEL.	xv
DAFTAR GAMBAR.	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Administrasi Publik	13
1. Pengertian Administrasi Publik	13
2. Paradigma Administrasi Publik	15
B. Pemberdayaan	19
1. Pengertian Pemberdayaan	19
2. Pemberdayaan Masyarakat	22
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	26
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat	29
C. Usaha Mikro Kecil Menengah	31
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	31
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah	34
3. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	36
D. Pengangguran	38
1. Pengertian Pengangguran	38
2. Jenis Pengangguran	40

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian	49
G. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum & Lokasi Penelian.....	53
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	53
a. Profil Kota Malang.....	53
b. Sejarah Kota Malang.....	54
c. Pembagian Wilayah Administratif.....	56
d. Kondisi Demografis.....	58
e. Makna Lambang.....	59
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	63
3. Gambaran Umum Usaha Mikro Kota Malang.....	69
B. Penyajian Data Fokus.....	70
1. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	72
a. Enabling.....	72
b. Empowering.....	75
c. Protecting.....	81
2. Dampak Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran.....	85
a. Peningkatan <i>Knowledge</i>	85
b. Peningkatan <i>Capacity</i>	87
c. Peningkatan <i>Independency</i>	91
C. Analisis Data Fokus.....	94
1. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	94
a. Enabling.....	94
b. Empowering.....	96
c. Protecting.....	99
2. Dampak Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran.....	101
a. Peningkatan <i>Knowledge</i>	101
b. Peningkatan <i>Capacity</i>	102
c. Peningkatan <i>Independency</i>	103

BAB V PENUTUP.	105
A. Kesimpulan.	105
B. Saran.	107
 DAFTAR PUSTAKA.....	 109



DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Tabel Daftar Nama Paguyuban UKM Kota Malang.....	94



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Jumlah Pengangguran Kota Malang.....	6
2. Jumlah UMKM Jawa Timur.....	7
3. Peta Wilayah Kota Malang Provinsi Jawa Timur.....	57
4. Makna Kota Malang.....	61
5. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	70
6. Produk Sari Apel Arya Nyeeez.....	72
7. Dokumentasi Pelatihan Olahan Berbasis Inovasi.....	75
8. Dokumentasi Sertifikat Bimbingan Teknis Pemasaran Produk Usaha Mikro.....	76
9. Dokumentasi Klinik Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	78
10. Dokumentasi Sertifikat HKI Mikik Usaha Mikro Sari Apel Arya.....	79
11. Dokumentasi Galeri UKM.....	82
12. Dokumentasi Sertifikat Merek Milik Usaha Mikro Sari Apel Arya.....	85
13. Jumlah Usaha Mikro Kota Malang.....	88
14. Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Kota Malang.....	90
15. Jumlah Pengangguran Kota Malang.....	91
16. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Pada Jumlah Pengangguran Kota Malang.....	92
17. Foto Wawancara dengan Ibu Fifi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	114
18. Foto Wawancara dengan Ibu Sri Wedarti di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	114
19. Foto setelah Wawancara dengan Ibu Kunarsih di Kediannya.....	115
20. Foto saat mengikuti Klinik Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.....	115

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul		Halaman
1. Dokumentasi Penelitian.....		114
2. Surat Riset.....		116
3. Interview Guide.....		117
4. Curriculum Vitae.....		118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat pengangguran Indonesia berjumlah sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibanding Agustus 2017. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengangguran, dengan demikian kebutuhan lapangan kerja semakin meningkat. Sukirno (2008:8) menyatakan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran adalah perencanaan tenaga kerja. Hal tersebut selaras dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dapat dilihat pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang di jadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dengan kata lain, pemerintah terus merancang strategi untuk mengatasi pengangguran sekaligus menumbuhkan serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah memfokuskan pada penumbuhan sektor-sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta melakukan pemberdayaan sehingga UMKM memiliki keunggulan daya saing untuk mencapai

kemandirian perekonomian. Menurut Hikmat, Hary dalam Surjono dkk (2007: 24) munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat, dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi berupa ketidak mampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang memberdayakan masyarakat. Friedman dalam Suryono (2007:24) berpendapat bahwa pembangunan alternatif tersebut harus lebih dipusatkan pada manusia dan lingkungan dari pada produksi, laba, pendekatan pertumbuhan ekonomi yang memakai pandangan perusahaan sebagai dasar ekonomi neoklasik.

Sumodiningrat dalam Surjono (2007:146) menyatakan bahwa strategi dalam menanggulangi kemiskinan antara lain adalah pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Proses ini diarahkan agar setiap upaya penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Petesch et al dalam Jayampathi dan Kaushalya (2018) berpendapat bahwa:

Petesch et al. have defined empowerment as increasing both the capacity of individuals or groups to make purposeful choices and their capacity to transform these choices into desired actions and outcomes. This definition implies that empowerment is the process of increasing capacity of the poor people, excluded and disadvantage groups to make choices and to be able to use it to realize desired outcome (Petesch et al. telah mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang bertujuan dan kapasitas mereka untuk mengubah pilihan ini menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Definisi ini menyiratkan bahwa pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas orang-orang miskin, kelompok-kelompok yang dikecualikan dan dirugikan untuk membuat pilihan dan dapat menggunakannya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan).

Dengan demikian, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang lebih baik yaitu dengan diupayakan melalui pemberdayaan. Batliwala dalam Jayampathi (2018) berpendapat bahwa:

defined empowerment as the process by which the powerless gain great control over the circumstances of their lives. It includes both the control over resources (physical, human, intellectual, financial) and over ideology (beliefs, values and attitudes). (mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses dimana orang yang tidak berdaya memperoleh kendali besar atas keadaan hidup mereka. Ini mencakup kontrol atas sumber daya (fisik, manusia, intelektual, finansial) dan atas ideologi (kepercayaan, nilai, dan sikap)).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkan dan mengembangkan sektor-sektor UMKM.

Menurut Suci (2017:52) pengembangan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga mengurangi angka pengangguran. Terbukti dalam masa krisis

ekonomi tahun 1998, hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertahan dari kolapsnya ekonomi dibandingkan dengan sektor yang lebih besar. Hal itu dilakukan karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah terbukti bisa bertahan dari terpaan krisis pada 1998, 2008, dan 2013. Bahkan, keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan digarap serius menjadi tulang punggung untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Pemerintah sangat gencar memberikan dorongan dalam meningkatkan peran dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas pasar domestik dan internasional.

Beberapa penelitian terdahulu juga membahas mengenai UMKM. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2013:142-149) yaitu, melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Menurut Darwanto (2013) UMKM dinilai memiliki keunggulan karena mampu bersaing dengan berbasis inovasi dan kreativitas yang menjadi tolak ukur utamanya. Penelitian tersebut bertujuan merumuskan strategi kelembagaan dalam mendorong inovasi dan kreativitas pelaku UMKM. Sedangkan Saputro, dkk (2010:140-145) melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 55.56%. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan peta rencana jangka panjang yang akan dilakukan untuk UKM di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah

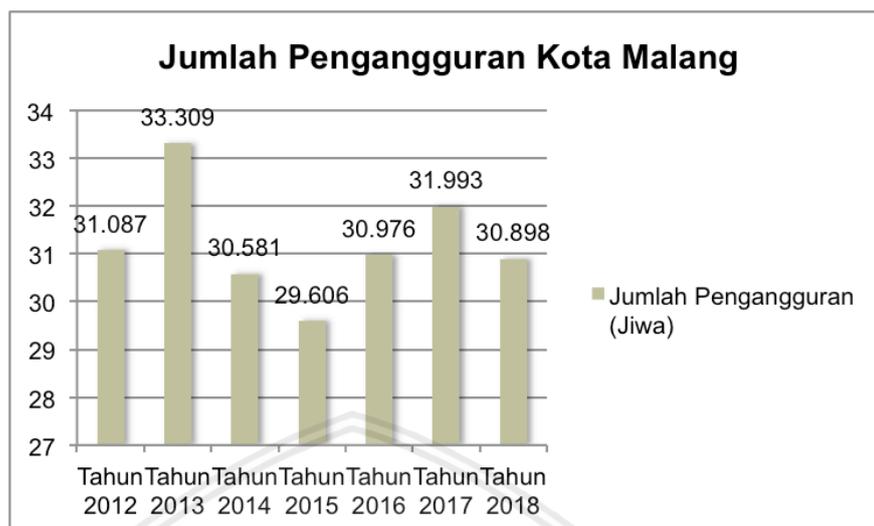
dipaparkan diatas menunjukkan bahwa UMKM adalah salah satu sektor yang cukup kuat serta mampu menyerap tenaga kerja.

Saat ini provinsi Jawa Timur menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor yang mampu menangani masalah pengangguran. Seperti yang dilansir dalam berita online tribun news menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya aturan PPh final 0,5 persen untuk UMKM pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan lebih melesat lagi. Jumlah UMKM akan meningkat lagi dan mereka bisa meningkatkan daya saingnya. Tentunya yang saya sampaikan, diharapkan UMKM mampu menurunkan tingkat pengangguran yang saat ini sudah turun di kisaran 3 persen”. (Lestari, 2018:1)

Dengan demikian, UMKM di Jawa Timur diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini tidak terkecuali di Kota Malang juga. Seperti penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya adalah pemberdayaan UMKM dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

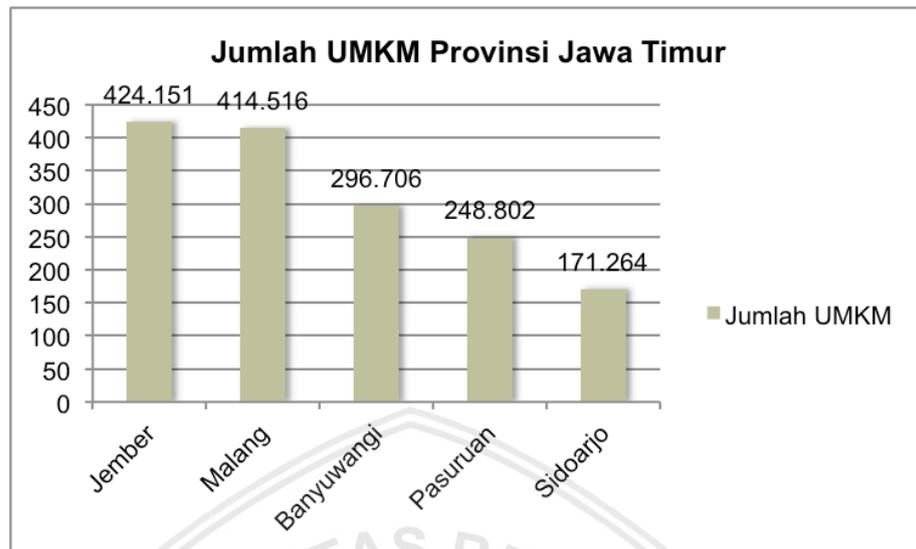
Data jumlah pengangguran yang berhasil diolah oleh BPS Kota Malang didapatkan hasil bahwa setiap tahunnya jumlah pengangguran mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Jumlah Pengangguran Kota Malang

Sumber : BPS, 2019

Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dikarenakan banyak tenaga kerja yang beralih ke bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga). Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya para tenaga kerja membuka lapangan usaha sendiri. Data UMKM yang berhasil diolah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur didapatkan hasil bahwa jumlah UMKM di Kota Malang merupakan kedua terbanyak dari Kota Jember. Jumlah UMKM Kota Jember yaitu 424.151 dan Kota Malang 414.516. Melihat jumlah UMKM yang bertumbuh semakin banyak mampu mengurangi tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. UMKM Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jawa Timur, 2018

Pemerintah Kota Malang berupaya mengatasi penurunan jumlah pengangguran dengan data BPS dan jumlah UMKM yang sudah didapatkan yaitu salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan adanya pemberdayaan UMKM. Hal ini dilandasi oleh pesatnya pertumbuhan UMKM. Seperti dalam berita *online* surya malang yang menyatakan sebagai berikut :

“Berdasarkan data statistik, jumlah UMKM di Kota Malang mencapai 113 ribu unit. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 77 ribu unit. Dari data itu, 87 persen atau sekitar 99 ribu unit masuk kategori usaha mikro yang omzetnya kurang dari Rp 300 juta setahun” (Wahyunik,2018:1)

Ditandai dengan peningkatan UMKM yang ada di Kota Malang menunjukkan bahwa Kota Malang mampu mengelola UMKM agar bisa mengurangi tingkat pengangguran. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merupakan instansi yang menaungi usaha mikro di Kota Malang dan juga sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota yang

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebelumnya bernama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang serta memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tidak lagi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dikarenakan orientasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah memfokuskan pada peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Selain itu, strategi pemerintah yang diperlukan antara usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah pun berbeda sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi usaha mikro untuk mewujudkan peningkatan usaha yang diinginkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berperan untuk memberdayakan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing sehingga dapat mewujudkan salah satu misi Kota Malang yaitu “meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.”

Salah satu penanganan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran yaitu melalui pemberdayaan UMKM. Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro adalah dinas yang akan mengembangkan Usaha Mikro Kecil di Kota Malang, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat sehingga usaha mikro dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap angka pengangguran, dan juga memiliki peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil sesuai dengan orientasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Namun, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Malang hanya berfokus pada usaha mikro. Dengan demikian, penulis mengangkat judul **“Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penentuan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran?
2. Bagaimanakah dampak pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penentuan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

2. Mendeskripsikan dan menganalisa dampak pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan Administrasi Publik khususnya tentang pemberdayaan usaha mikro.
- b. Memberikan sumbangan bahan penelitian bagi peneliti lain yang mengkaji terkait pemberdayaan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.
- b. Menjadikan bahan evaluasi dengan melihat pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

E. Sistematika Penulisan

Bentuk upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan

sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu pemberdayaan UMKM di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan administrasi publik, pengertian pemberdayaan, karakteristik UMKM, strategi pengembangan UMKM dan pengertian pengangguran.

BAB III : METODE PENELITIAN

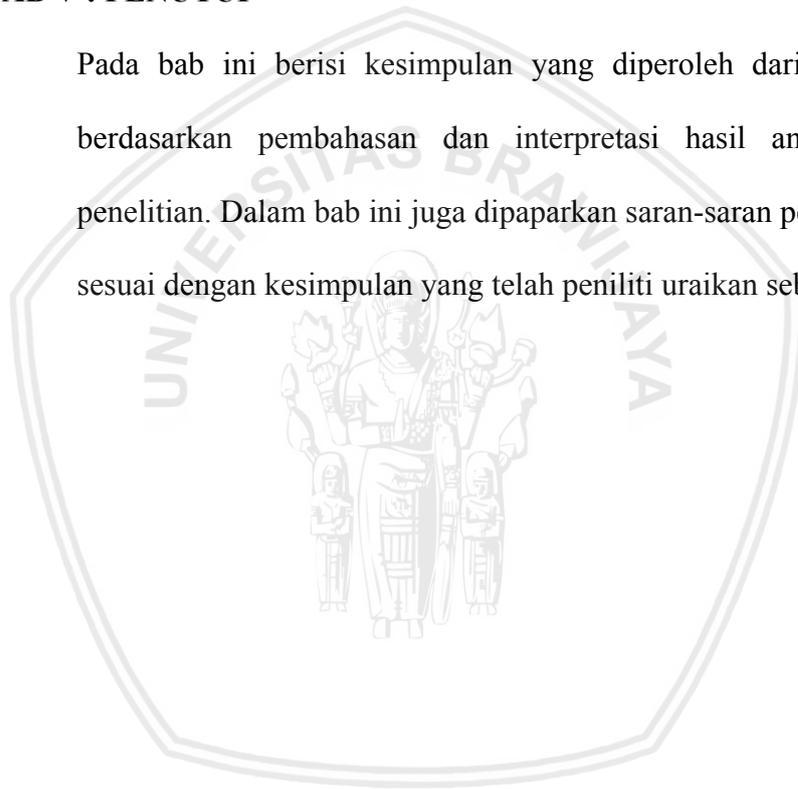
Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang mencakup penyajian data dan analisis data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian serta memaparkan interpretasi hasil data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pembahasan dan interpretasi hasil analisis data penelitian. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran peneliti yang sesuai dengan kesimpulan yang telah peneliti uraikan sebelumnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan terjemahan dari *public administration*. Menurut Henry dalam Indradi (2006:113) administrasi publik diartikan sebagai suatu yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan menurut Simon yang dikutip oleh Indradi (2006:117) menyatakan bahwa administrasi publik yaitu kegiatan dari sekelompok dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dilihat secara teoritis, administrasi publik mempunyai banyak pengembangan dan perubahan. Mengutip dari Indradi (2006:116) menyatakan administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Pengertian tersebut menyatakan bahwa administrasi publik menegaskan pada proses pengelolaan, politik, dan hukum. Administrasi publik juga mempunyai subjek dengan fungsi yang

berbeda yaitu pemerintah dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari penerapan administrasi publik adalah untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Keban (2004:8) cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Maka dari itu administrasi publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat. Mengutip dari Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, berkenaan dengan pengaturaan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik juga berusaha melakukan penekanan pada pentingnya kegiatan pengelolaan dalam pencapaian sebuah tujuan.

Selanjutnya Indradi (2006:116) mengemukakan bahwa administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efesiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Hal ini dapat diartikan dalam memenuhi kebutuhan akan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan program dari kebijakan tersebut oleh setiap Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan keilmuan yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan tersebar pada berbagai sektor mewakili seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pemerintahan. Administrasi publik mengatur segala sesuatu untuk kepentingan publik yang artinya memberikan banyak manfaat untuk publik itu sendiri.

2. Paradigma Administrasi Publik

Dalam administrasi publik terdapat banyak paradigma, dan paradigma tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Paradigma administrasi publik di mulai dari *Old Public Administration* (OPA), kemudian berkembang ke paradigma *New Public Management* (NPM), kemudian seiring dengan berjalan dan berkembangnya waktu, dua paradigma tersebut tidak lagi cocok dengan keadaan pemerintah saat ini, satu tahun kemudian menjadi *New Public Service* (NPS).

Paradigma awal yaitu *Old Public Administration* (OPA) diusung oleh Woodrow Wilson. Pada paradigma ini, Woodrow Wilson menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Bagi Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi administrator untuk mempraktekan sistem nepotisme dan spoil, maka dari itu Wilson mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan bagi pihak eksekutif dan legislatif (politik) dimana legislator hanya merumuskan kebijakan sedangkan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan yang ada. Kemudian seiring berjalannya

waktu paradigma *Old Public Administration* (OPA) ini mendapat kritikan karena pemerintahan pada era *Old Public Administration* (OPA) ini dianggap kaku dan sentralistik sehingga harus diganti lagi sesuai dengan kondisi yang sedang dibutuhkan saat itu (Silviana 2012:1-3).

Kemudian posisi *Old Public Administration* (OPA) bergeser kepada paradigma baru yaitu *New Public Management* (NPM) yang diusung oleh Taylor. *New Public Management* (NPM) merupakan sebuah gerakan yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip organisasi sektor privat kedalam organisasi sektor pemerintah. Menurut Taylor, konsep *Old Public Administration* (OPA) yang dinilai kaku dan sentralistik harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan *profitable*. Taylor juga mengungkapkan bahwa konsep *New Public Management* (NPM) memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip utama dalam paradigma ini. Selain itu prinsip *New Public Management* (NPM) lainnya bahwa pembangunan birokrasi haruslah memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, melakukan deregulasi, dan memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif. Kemudian seiring berjalannya waktu, paradigma *New Public Management* (NPM) mendapat banyak kritikan karena para birokrat cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan

kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, serta berkolaborasi untuk mencapai tujuan pribadi tersebut (Silviana 2012:3-4).

Kemudian posisi *New Public Management* (NPM) bergeser kepada paradigma *New Public Service* (NPS). Sebelumnya, *New Public Management* (NPM) dikritik oleh Denhardt dan Denhardt yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memfokuskan usaha atau pelayanannya untuk melayani dan memberdayakan warga negara atau masyarakat karena masyarakat sebagai pemilik “kapal”. *New Public Management* (NPM) dikritik sebagai paradigma yang telah melupakan siapa sebenarnya pemilik kapal (*who owned the boat*) (Silviana, 2012:5). Dalam hal inilah mengapa terjadinya perubahan dan perkembangan paradigma menjadi *New Public Service* (NPS). Denhardt dan Gray dalam Silviana (2012:6-7):

”Di dalam paradigma ini tidak ada lagi yang menjadi penonton. Semua jadi pemain atau ikut bermain. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. *Citizen first* harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah.”

Pelajaran penting yang dapat ditimba dari paradigma NPS ini adalah bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat,

berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standard yang ada, dan menghargai masyarakat”.

Menurut Denhardt dan Denhardt dalam Wijaya (2014:1) terdapat tujuh prinsip-prinsip *New Public Service* (NPS) yang berbeda dengan prinsip *Old Public Administration* (OPA) dan *New Public Management* (NPM):

- a. Pertama, peran utama dari pelayanan publik adalah membantu warga masyarakat mengartikulasi dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, daripada mencoba mengontrol dan mengendalikan masyarakat kearah yang baru;
- b. Kedua, administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik;
- c. Ketiga, kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui upaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif;
- d. Keempat, kepentingan publik lebih merupakan agregasi kepentingan pribadi para individu;
- e. Kelima, para pelayan publik harus memberikan perhatian, tidak semata kepada pasar, tetapi juga kepada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard professional dan kepentingan warga masyarakat;

- f. Keenam, organisasi publik dan jaringan-jaringan yang melibatkan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargai semua orang;
- g. Ketujuh, kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi publik berkaitan dengan pelayanan publik, dan apabila prinsip-prinsip paradigma tersebut dapat dijalankan untuk melayani dan memberdayakan masyarakat maka pelaksanaan pelayanan publik dapat menjadi efektif.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berarti “pemberkuasaan”. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Konsep pemberdayaan yang dipelopori oleh Friedman muncul karena adanya dua hal, yakni kegagalan model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta harapan karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Friedman dalam Suryono (2010:21) menyatakan bahwa konsep empowerment sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial pengalaman langsung. Konsep pemberdayaan yang diajukan oleh Friedman menitik beratkan pada persoalan lokalitas dikarenakan *civil society* akan lebih siap diberdayakan melalui isu-isu lokal sekaligus tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society*. Batliwala dalam Jayampathi (2018) berpendapat bahwa:

defined empowerment as the process by which the powerless gain great control over the circumstances of their lives. It includes both the control over resources (physical, human, intellectual, financial) and over ideology (beliefs, values and attitudes). (mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses dimana orang yang tidak berdaya memperoleh kendali besar atas keadaan hidup mereka. Ini mencakup kontrol atas sumber daya (fisik, manusia, intelektual, finansial) dan atas ideologi (kepercayaan, nilai, dan sikap)).

Pemberdayaan diartikan sebagai proses dimana orang yang tidak berdaya memperoleh hak untuk berdaya dan Petesch et al dalam Jayampathi dan Kaushalya (2018) berpendapat bahwa :

have defined empowerment as increasing both the capacity of individuals or groups to make purposeful choices and their capacity to transform these choices into desired actions and outcomes. This definition implies that empowerment is the process of increasing capacity of the poor people, excluded and disadvantage groups to make choices and to be able to use it to realize desired outcome (telah mendefinisikan pemberdayaan sebagai peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan yang bertujuan dan kapasitas mereka untuk mengubah pilihan ini menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan.

Definisi ini menyiratkan bahwa pemberdayaan adalah proses peningkatan kapasitas orang-orang miskin, kelompok-kelompok yang dikecualikan dan dirugikan untuk membuat pilihan dan dapat menggunakannya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan).

Pemberdayaan tidak hanya membuat masyarakat memiliki kemampuan pemberdayaan dijadikan sebagai proses peningkatan kapasitas orang-orang miskin, kelompok-kelompok yang dikecualikan dan dirugikan untuk membuat pilihan dan dapat menggunakannya untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Fahrudin (2011:7) menyimpulkan beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan merupakan sebuah proses kolaboratif, dimana klien yang mencakup individu, keluarga kelompok, organisasi, masyarakat dan pekerja sosial bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses dari pemberdayaan melihat sistem klien sebagai pemegang peranan penting serta mampu memberikan akses kepada sumber-sumber dan peluang. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergi dan berevolusi.
- c. Klien sebagai casual agent yang mampu menerima perubahan.
- d. Kompetensi atau kemampuan yang diperoleh dari sebuah pengalaman hidup.
- e. Pemberdayaan dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan ekonomi.

Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya atau pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dan juga harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Munculnya harapan karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi.

Setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda tetapi tetap memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu membangun daya, dengan mendorong, memotivasi dan mengakibatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya pengembangan diri sendiri atau orang lain untuk berbuat baik. Ginandjar Kartasasmita (1997:20) memberikan pengertian pemberdayaan sebagai berikut :

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.”

Pemberdayaan pada intinya adalah membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas yang berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka (Shardlow dalam Cook, Sarah dan Macualy, 1997:2).

Shardlow memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga nantinya akan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk kehidupannya kedepan. Maka dari itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengubah cara-cara aparatur dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Pemahaman yang lebih jelas tentang misi dan nilai-nilai organisasi;
- b. Memfokuskan perhatian pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan baik internal maupun eksternal; dan
- c. Menekankan pada pelatihan dan pengembangan;

Dikemukakan pula bahwa untuk menuju pemberdayaan yang berhasil maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Hubungan visi;
- b. Diarahkan dengan contoh-contoh;
- c. Meninjau struktur organisasi;
- d. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus;

- e. Ukuran pengembangan yang terjadi dan dikenali serta menghargai keberhasilan.

Beberapa hal penting yang harus diketahui untuk membuat pengertian yang operasional mengenai pemberdayaan masyarakat menurut Prasodjo (2004), yakni :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang/tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Terdapat kecenderungan yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, kecenderungan primer yang menjelaskan mengenai proses pemberian/pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan serta kemampuan kepada individu agar menjadi lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder yang lebih menekankan pada proses pemberian motivasi dan dorongan agar individu mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.
3. Pemberdayaan masyarakat tidak menyangkut aspek ekonomi saja, akan tetapi juga berupa pemberdayaan di bidang politik, budaya, ekologi, dan spiritual.
4. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program dan proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan kegiatan yang biasanya ditentukan jangka waktu pencapaiannya.

Sedangkan untuk proses, pemberdayaan yang berupa proses yang berkesinambungan.

Upaya yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program yang dimana dilakukan dalam tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan jangka waktunya, apabila program tersebut telah usai maka konsekuensi yang didapat adalah pemberdayaan dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Apabila dilihat dalam sisi proses, pemberdayaan merupakan suatu bentuk dari proses yang berkesinambungan dalam sepanjang hidup seseorang. Terdapat 5 prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dalam konsep pemberdayaan menurut Robin dan Sumaryadi (2005:94-96), yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan

baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Dari pengertian mengenai pemberdayaan di atas dapat diketahui bahwa setelah diberdayakan masyarakat harus mampu memotivasi dan mendorong diri mereka untuk mendapatkan kekuatan dan kemampuan dalam upaya menyejahterahkan dirinya dalam segala aspek kehidupan. Maka dengan begitu tujuan dari pemberdayaan akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses pemberdayaan maka diharapkan pula masyarakat dapat terbantu selama proses pemberdayaan berlangsung.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2014) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang dilakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan dan melakukan sesuatu yang di pandang tepat untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan menurut Payne (1997) yang dikutip oleh Rukminto Adi (2008:77) ditujukan untuk:

“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to”.

Tujuan utama yang ingin dicapai dari pembedayaan masyarakat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dalam kemiskinan dan keterbelakangan (Mardikanto dan Soebianto, 2012:29). Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) yang meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, akan tetapi yang terpenting adalah perbaikan pendidikan yang dapat menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, maka diharapkan akan

- memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya dalam aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran.
- c. Perbaiki tindakan artinya dengan berbekal kebaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan tercipta tindakan-tindakan yang lebih baik.
 - d. Perbaiki kelembagaan artinya dengan perbaikan kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
 - e. Perbaiki usaha artinya dengan perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan akan memperbaiki bisnis yang dijalankan.
 - f. Perbaiki pendapatan artinya dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
 - g. Perbaiki lingkungan artinya dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
 - h. Perbaiki kehidupan artinya dengan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

- i. Perbaiki masyarakat dimana keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses dapat diartikan sebagai runtutan perubahan/peristiwa dalam perkembangan suatu hal (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (1996) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- b. *Understanding* atau pemahaman lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
- c. *Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.

- d. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hogan dalam Adi (2008) menyatakan bahwa “proses pemberdayaan individu merupakan suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut.” Hal tersebut berarti proses pemberdayaan tidak hanya berhenti dalam satu masa saja, akan tetapi proses pemberdayaan berlangsung selama individu tersebut masih ada dan berusaha untuk membedakan dirinya sendiri. Menurut Brautigam dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017:42-44) dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat 3 hal pokok, yaitu :

- a. *Enabling* atau mengembangkan, menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Yang berarti bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan, tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya.
- b. *Empowering* atau memberdayakan, meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang terkait dengan pasar *input* dan *output*.
- c. *Protecting* atau melindungi, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah

persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dewasa ini memberikan banyak kontribusi dalam sektor ekonomi terutama dalam menyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir. Dengan jumlah serapan tenaga kerja yang meningkat sektor UMKM dianggap memegang peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan serta pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai instansi yang bersentuhan dengan UMKM mendefinisikan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Mempunyai omzet penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- c. Milik warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e. Bentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum (termasuk koperasi).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disebut sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat suatu daerah. Hal ini disebabkan karena usaha mikro kecil dan menengah mempunyai fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar (Pratomo, 2004:13) dan juga memberikan banyak kontribusi terutama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun dalam Pendapat Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

Selain itu, UMKM juga memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu Negara termasuk Indonesia. Saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami stagnansi dalam aktivitasnya sedangkan usaha kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih tangguh dalam krisis yang terjadi. Menurut Partomo (2004:8) terdapat beberapa keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, diantaranya:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah mudah terjadi dalam pengembangan produk
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis
- e. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Setiap usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar memiliki karakteristik yang berbeda-beda dimana dengan karakteristik tersebut sebuah usaha memberikan kontribusi yang berbeda dari yang lainnya dalam perekonomian Indonesia.

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Suatu usaha harus memenuhi suatu karakteristik tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, menengah ataupun besar. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi:

a. Kriteria Usaha Mikro:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

3. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai usaha yang masih berkembang membutuhkan berbagai strategi yang sesuai dengan UMKM itu sendiri untuk mengembangkan usaha terkait. Menurut Rachmat (2005:109) strategi pengembangan UMKM yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik secara jangka menengah maupun jangka panjang:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan.
 - (1) Menumbuhkan iklim usaha mencakup kebijakan: persaingan sehat, pemberian peluang usaha, penumbuhan kemitraan, pencadangan tempat dan bidang usaha, memperluas sumber dan bentuk-bentuk pembiayaan.
 - (2) Dukungan Perkuatan berupa upaya peningkatan: kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, optimalisasi organisasi dan manajemen akses pasar.
- b. Membangun skenario kebangkitan ekonomi non-sembako menuju teknologi tepat guna.
- c. Mencegah konsentrasi asset produktif di tangan segelintir orang dan memperluas asset produktif di tangan rakyat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan advokasi rakyat dalam proses pembangunan.

- e. Ketersediaan dana yang cukup untuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah.
- f. Mengembangkan basis ekonomi wilayah daerah tingkat II dan pedesaan.
- g. Mempercepat proses pembangunan dari kebutuhan pokok (*basic need*) ke sektor modern yang mempunyai nilai tambah.

Strategi-strategi tersebut apabila dilakukan secara baik dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut yang memberikan peran dalam penumbuhan dan perbaikan perekonomian suatu daerah. Hafsah (2004:43) menyatakan beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UMKM:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.
- b. Bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM.
- c. Pelindungan usaha, jenis-jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).
- d. Pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM atau antara UKM dengan pengusaha besar di

dalam negeri maupun di luar negeri untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.

- e. Pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
- f. Membentuk lembaga khusus, perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan.
- g. Memantapkan asosiasi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diberlakukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.
- h. Mengembangkan kerjasama setara, perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM).

D. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2008:8) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja

tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Mankiw (2003:150) pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Menurut Sukirno (2008:472), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

2. Jenis Pengangguran

Sadono Sukirno (2008:10-11) mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Setengah menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

d. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian dimana pemilihan metode yang tepat sangat diperlukan demi menunjang tercapainya hasil dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan dalam metode penelitian adalah apa yang ada di dalam masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan juga beberapa hal di dalam masyarakat yang lain. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014:5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai pemberdayaan Usaha Mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif akan membuat seorang peneliti mampu melihat secara lebih luas dan mendalam fenomena yang terjadi pada situasi *social* yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku, dan interaksi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan masyarakat maupun sebaliknya. Penelitian Kualitatif

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Penelitian deskriptif mengarah pada data yang berupa olahan kata serta hasilnya berupa sajian atau kutipan-kutipan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan pelaksanaan penelitian untuk memenuhi kriteria memasukkan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan UMKM dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang, yaitu :
 - a. Mengembangkan usaha mikro (*Enabling*)
 - b. Memberdayakan usaha mikro (*Empowering*)
 - c. Melindungi usaha mikro dari eksploitasi (*Protecting*)
2. Dampak pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang
 - a. Peningkatan Pendidikan (*Knowledge*)
 - b. Peningkatan Kapasitas (*Capacity*)
 - c. Peningkatan Kemandirian (*Independency*)

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Malang berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang memiliki 113 ribu unit UMKM serta adanya perkembangan UMKM yang pesat di Kota Malang.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti ataupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian. Situs penelitian ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak meluas. Adapun situs penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai instansi yang menaungi usaha mikro di Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian, Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat pengklasifikasian jenis data oleh Sugiyono (2009) yaitu terdapat dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut sangat penting dan diperlukan untuk ketetapan dari sejumlah informasi yang relevan dengan data terkait variabel- variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian

dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data-data yang didapatkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya atau hasil yang diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Sumber data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil dari wawancara langsung dengan pihak terkait di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Ibu Sri Wedarti, selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha yang dapat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 13.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
 - 2) Ibu Fifi, selaku staff Usaha Mikro yang dapat diwawancarai pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
 - b. Hasil dari wawancara langsung dengan produsen Sari Apel Arya sebagai usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ibu Kunarsih, selaku pemilik dari Sari Apel Arya yang diwawancarai pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 10.00 WIB di kediamannya.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian yaitu berupa foto, dokumen-dokumen terkait pemberdayaan Usaha Mikro, arsip, peraturan-peraturan atau regulasi, jurnal dan buku-buku literature yang diperoleh dari suatu organisasi atau dari pihak yang mengumpulkan dan mengolah literature tersebut sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta referensi lain dari media cetak maupun media elektronik yang mampu memperkuat dan mendukung data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan kondisi yang alamiah. Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono:2014). Berikut adalah beberapa cara untuk mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh data yang valid dan relevan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Teknik wawancara atau macam – macam wawancara menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono (2014) adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara semi terstruktur lebih mendalam, lebih bebas dalam pelaksanaannya, ingin menemukan permasalahan lebih terbuka untuk mendapatkan pendapat dan ide – ide dari informan atau responden. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Sri Wedarti, selaku Kepala Seksi Perlindungan usaha, Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Malang.

- b. Ibu Fifi, selaku Staff Bidang Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
- c. Ibu Kunarsih, selaku pemilik dari usaha mikro Sari Apel Arya binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

2. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pemberdayaan Usaha Mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, serta mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokumen resmi yang ada di lokasi penelitian yang dianggap penting dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan atau mengumpulkan dokumen yang ada berkenaan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini berupa catatan, foto-foto, arsip, surat, agenda serta data sekunder lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014:222). Selanjutnya menurut (Nasution dalam Sugiyono, 2014) menyatakan:

“Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu- satunya yang dapat mencapainya.”

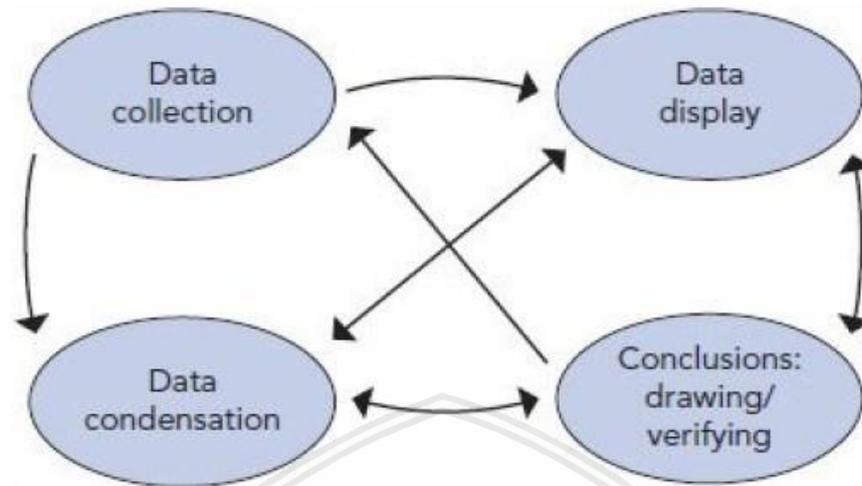
Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri. Salah satu ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang terjun ke lapangan baik wawancara maupun observasi untuk memperoleh data yang diinginkan.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini digunakan untuk membantu peneliti untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan tema penelitian.
3. Alat penunjang yang terdiri dari kamera dan alat perekam yang

terdapat di handphone peneliti serta catatan lapangan (*field note*). Instrument tersebut dapat membantu peneliti untuk menggunakan metode dokumentasi sehingga apa yang ada di lapangan dapat terdokumentasi dengan baik.

G. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2014:335) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), analisis terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan.



Gambar 3. Analisis Data dan Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana 2014

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data atau *data collection period* merupakan aktivitas mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan sifat yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan informan kunci, serta dokumentasi serta sekunder mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna dan suatu data yang telah didapat. Penyajian data-data mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang disajikan dalam bentuk naratif, gambar, dan angka.

3. Kondensasi data (*data condensation*)

Pemilihan data atau *data condensation* merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil *interview*, dokumen, dan fakta di lapangan. Adanya kondensasi data, data-data mengenai pemberdayaan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Malang akan menjadi lebih kuat. (menghindari proses reduksi data karena menjadikan data yang didapatkan menjadi lebih lemah dikarenakan ada beberapa data yang akan hilang)

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion: drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan data atau *conclusion drawing/verification* merupakan tahap terakhir dari model analisis data. Ketika proses ini, data yang telah dikondensasi dan dirangkaikan secara sistematis (*display*) selanjutnya diambil benang merahnya sebagai kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kesimpulan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum & Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Profil Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang memiliki sebutan Tri Bina Cita Kota Malang yang terdiri dari Malang Kota Pendidikan, Malang Kota Industri, dan Malang Kota Pariwisata. Salah satu pokok dari Tri Bina Cita adalah Malang sebagai Kota Industri, dimana sektro industri menopang peranan penting dalam perekonomian Kota Malang. Potensi yang dimiliki Kota Malang baik sumberdaya alam hingga sumber daya manusia menjadikan kota ini strategis untuk berbagai kegiatan ekonomi hingga pendidikan.

Kota Malang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya ini kerap kali dimanfaatkan oleh warga Kota Malang untuk dijadikan usaha industri yang membawa berbagai keuntungan, sebagai contohnya adalah industri keramik di Dinoyo, industri keripik tempe di Sanan, dan sebagainya. Karena perkembangan industri tersebut membawa dampak bagi Kota Malang yang semula dikenal sebagai kota agraris dan hijau, kini menambah predikat lagi sebagai kota Industri. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Malang telah

menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan pembangunan infrastruktur serta perkembangan wisatanya mampu menarik wisatawan tidak hanya lokal namun juga internasional.

b. Sejarah Kota Malang

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Pada mulanya, kawasan Idjen Boulevard hanya dinikmati oleh keluarga asal Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

Pada tahun 1978 kereta api mulai beroperasi di Kota Malang dan sejak saat itu Kota Malang berkembang dengan pesat. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna lahan, munculnya daerah-daerah yang terbangun tanpa terkendali, perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti contohnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri.

Sejalan dengan perkembangan Kota Malang yang tiada henti, urbanisasi pun terus berlangsung sehingga kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat hingga diluar kemampuan pemerintah yang

c. Wilayah Administratif

Kota Malang secara astronomis terletak pada $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kota Malang membagi wilayah administratifnya kedalam 5 kecamatan dan setiap kecamatan memiliki kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Pembagian wilayah administratif Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Klojen: 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2) Kecamatan Blimbing: 11 Kelurahan, 20 RW, 834 RT
- 3) Kecamatan Kedungkandang: 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4) Kecamatan Sukun: 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru: 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

Kota Malang yang terletak pada dataran tinggi memiliki luas km² dengan ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut merupakan salah satu destinasi pariwisata dikarenakan keindahan alamnya yang dikelilingi oleh pegunungan, antara lain:

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Tengger di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang terdiri dari bagian selatan yang termasuk dataran tinggi yang cukup luas ini dapat dipergunakan untuk kegiatan perindustrian. Bagian utara yang merupakan dataran tinggi yang subur dapat dipergunakan untuk lahan

pertanian. Bagian barat Kota Malang merupakan dataran tinggi yang amat luas sehingga dijadikan daerah pendidikan. Namun, bagian timur Kota Malang merupakan dataran tinggi dengan keadaan alam yang kurang subur. Letak Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Secara geologi daerah kota Malang disusun oleh batuan hasil kegiatan gunung api yang terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu akuifer dengan kedalaman kurang dari 40m, kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40-100m, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100-150m.

d. Kondisi Demografis

Melirik pada keadaan demografis Kota Malang, berdasarkan data yang dihimpun oleh DISPENDUKCAPIL tahun 2013, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 836.373 dengan persebaran penduduk di Kecamatan Blimbing sebanyak 185.187 jiwa, Kecamatan Klojen 107.212 jiwa, Kecamatan Kedung Kandang sebanyak 191.851 jiwa, Kecamatan Sukun 191.229 jiwa, dan kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk sejumlah 160.894 jiwa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Kota Malang memiliki dinamika penduduk yang ditandai oleh urbanisasi dari daerah lain. Dapat dikatakan bahwa penambahan penduduk di Kota Malang semata-mata tidak hanya disebabkan oleh kelahiran, namun dapat disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari daerah lain.

Sebagian besar suku masyarakat Kota Malang adalah suku Jawa, namun tidak menutup kemungkinan adanya suku minoritas diantaranya masyarakat suku Madura, Arab, dan Tionghoa. Agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Malang adalah Islam yang diikuti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghu Cu. Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk adalah Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran, serta dikenal adanya bahasa walikan sebagai khas dari Kota Malang sendiri.

e. Makna Lambang



Gambar 5. Makna Kota Malang

Sumber: www.malangkota.go.id.

Kota Malang memiliki semboyan “Malang Kucewara.” Semboyan ini mulai dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Malang 1964. Sebelum menggunakan semboyan “Malang Kucewara”, semboyan yang digunakan adalah “Malang Namaku, Maju Tujuanku” yaitu terjemahan dari “Malang Nominator, Sursummoveor”. Semboyan tersebut disahkan dengan “Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. Poerbatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok.

Semboyan Kota Malang yang sekarang digunakan “Malang Kucewara” memiliki arti “Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.” Semboyan ini di usulkan oleh Prof. DR. R. Ng. Poerbatjaraka yang diambil dari kata sansekerta yang memiliki perincian kata sebagai berikut:

1. Mala: segala sesuatu yang kotor, kecurangan, kepalsuan, akibat buruk
2. Angkuca/angkuc: menghancurkan atau membinasakan
3. Icwara: Tuhan yang maha esa

Semboyan Malang Kucewara terdapat pada lambang dari Kota Malang, adapun makna lambang dari Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Lambang segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 2) Bintang bersudut lima sama dengan bintang pada perisai dalam lambang Negara Republik Indonesia bermakna ketuhanan yang maha esa.
- 3) Lambang tugu merupakan tugu yang terletak di alun-alun Balai Kota Malang yang berisikan:
 - a) Lima jingga menjulang ke atas membawakan Pancasila.
 - b) Bambu runcing di tengah-tengah lingga melambangkan kekuatan dan kesatuan, keperintisan, dan kepahlawanan 1945.
 - c) Tiga lingga yang nampak di depan membawakan arah tujuan perkembangan Kota Malang menjadi kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata.

Adapun makna warna pada lambang Kota Malang:

- 1) Warna merah putih: lambang bendera nasional Indonesia.
- 2) Merah lambang keberanian dan putih lambang kesucian serta kebersihan.
- 3) Kuning lambang keluhuran dan kebesaran.
- 4) Hijau lambang kesuburan.
- 5) Biru muda lambang kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanah air, dan bangsa.
- 6) Visi dan Misi Kota Malang

Seperti halnya dengan daerah otonomi lainnya, Kota Malang memiliki visi dan juga misi di tahun 2013-2018 yaitu:

“Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan Kota Malang tahun 2013-2018 sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik

fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.

6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman dan berbudaya.

7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih kompetitif.

8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah ditentukannya peduli wong cilik sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang.

Kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi, hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus membawa dampak baik bagi masyarakat Kota Malang khususnya bagi wong cilik itu sendiri. Visi bermartabat juga diharapkan dapat mewujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, asri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya dan toleransi yang dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan. Harapan dari pihak pemerintah yaitu dapat meminimalisir adanya KKN serta meningkatkan pelayanan publik yang

unggul dan berdaya saing. Serta dapat menempatkan Kota Malang sebagai kota terkemuka di Indonesia dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Adapun akronim dari visi BERMARTABAT adalah bersih, makmur, adil, religius toleran, terkemuka, aman, berbudaya, asri dan terdidik.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro di Kota Malang, mulai dari perumusan kebijakan hingga pemberdayaan dan pengembangan usaha. Sebelumnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki nama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang serta memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tidak hanya di bidang koperasi dan usaha mikro namun juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

Semenjak berganti nama serta tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi serta usaha mikro yang ada di Kota Malang. Perubahan tersebut disebabkan oleh

adanya orientasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk memfokuskan pada peningkatan usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Selain itu, pemberdayaan yang diperlukan antara usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah pun berbeda sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi usaha mikro untuk mewujudkan peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil sesuai dengan yang diinginkan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berperan untuk memberdayakan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing sehingga dapat mewujudkan misi Kota Malang yaitu “meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.” Agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Strategik Kota Malang merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD tersebut disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang UMKM.
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007.
 11. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM no. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah daerah.
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

15. Peraturan Walikota Malang nomor 109 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merumuskan visi dan misi berdasarkan INPRES RI No. 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi, misi, serta sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang disajikan sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri.

2. Misi

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi.
- b. Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya koperasi yang berkualitas sesuai jati dirinya.
- b. Terwujudnya UKM yang professional.

4. Sasaran

- a. meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Meningkatnya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan usaha.

- c. Meningkatnya UKM dalam mengakses permodalan.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM.

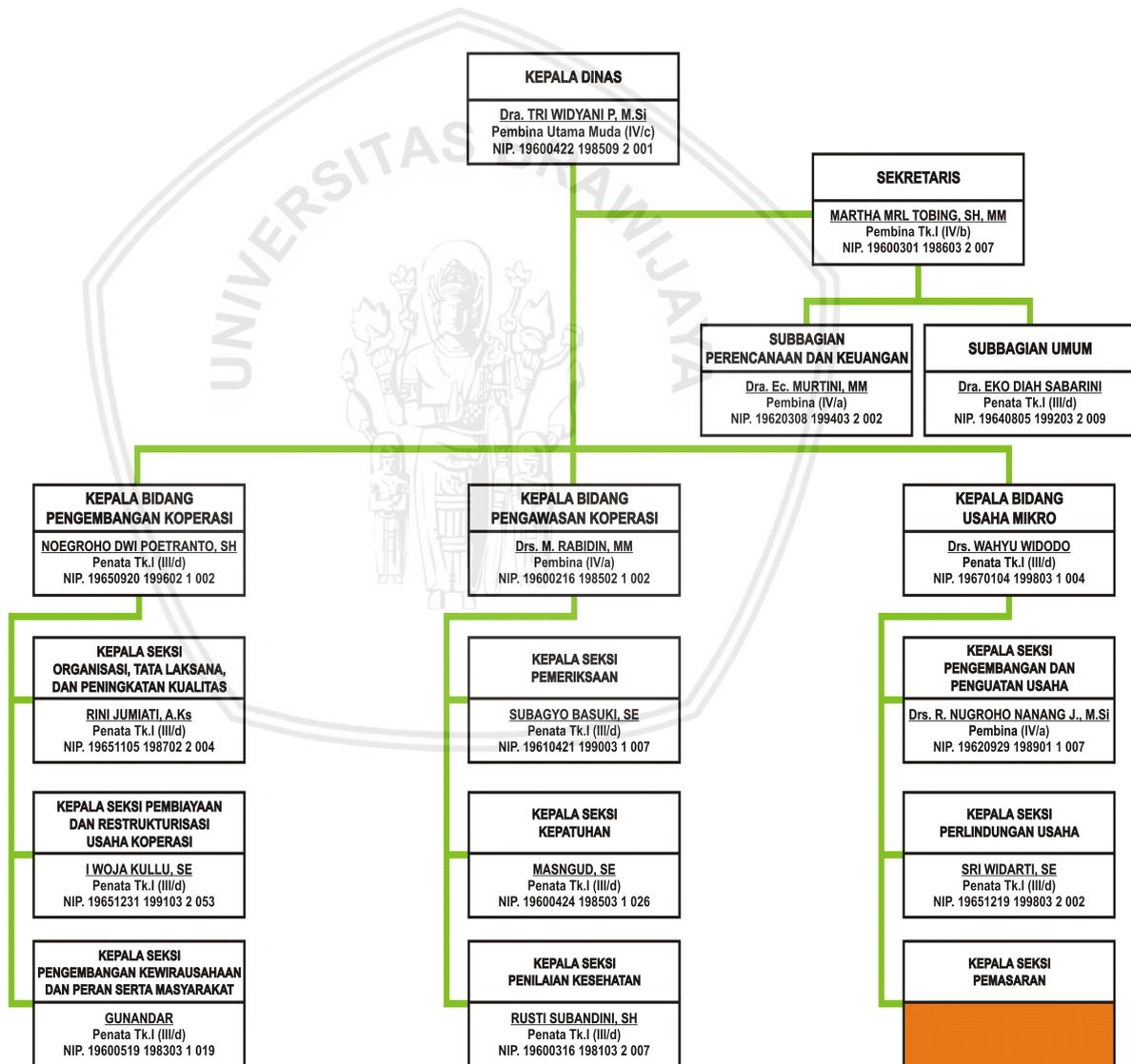
Penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro.
2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
4. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
5. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah
6. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah
7. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan

koordinasi dengan para pemangku kepentingan

8. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA MALANG



**Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Malang**

Sumber : www.malangkota.go.id



3. Gambaran Umum Usaha Mikro Kota Malang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mempunyai banyak usaha mikro di dalamnya. Kota Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat dan memiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi yang menaungi segala permasalahan usaha mikro. Berlokasi di jalan Panjisuroso No.18, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Pelatihan dan adanya Klinik Bisnis adalah program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang dapat mengembangkan pemberdayaan usaha mikro. Setiap tahun binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang selalu bertambah dan juga tenaga kerja usaha mikro yang setiap tahun selalu bertambah. Jumlah usaha mikro dan jumlah tenaga kerja usaha mikro memberikan dampak kepada jumlah pengangguran yang ada di Kota Malang yaitu dapat mengurangi sedikit demi sedikit pengangguran yang ada di Kota Malang setiap tahunnya.

Dengan diadakannya pelatihan dan Klinik Bisnis para masyarakat dapat menghasilkan berbagai macam makanan, minuman, *handycraft* dan *fashion* ada di bawah binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Salah satu Usaha Mikro yang sudah berdiri selama empat tahun yaitu Usaha Mikro “Sari Apel Arya”. Usaha Mikro Sari Apel Arya yang berlokasi di Jl. Manggar 3 No. 6, Lowokwaru, Kota Malang merupakan usaha mikro yang bergerak pada bidang minuman sari apel.

Usaha tersebut merupakan usaha tradisional atau usaha rumahan yang digerakkan oleh satu keluarga dan usaha sari apel milik Ibu Kunarsih, ini sudah berumur empat tahun. Sari Apel Arya milik Ibu Kunarsih telah tersebar tidak hanya diwarung-warung kecil namun juga ke beberapa toko oleh-oleh yang ada di Kota Malang. Usaha mikro Sari Apel Arya merupakan anggota dari paguyuban Kube Arema Malang, Ibu Kunarsih menjadi pemimpin di Paguyuban Kube Arema Malang. Paguyuban tersebut berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.



Gambar 7. Produk Sari Apel Arya Nyeezz

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

B. Penyajian Data Fokus

Kota Malang sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat dan memiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi yang menaungi segala permasalahan usaha mikro. Berlokasi di jalan Panjisuroso No.18, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Dinas tersebut memiliki peran sebagai

pembina terhadap seluruh Usaha Mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Salah satu usaha mikro yang bergerak di bidang industri minuman ini telah menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang selama dua tahun. Peneliti tertarik untuk berfokus pada pemberdayaan usaha mikro Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran melalui perkembangan usaha mikro Sari Apel Arya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Malang banyak bergerak di bidang handycraft, fesyen serta kuliner. Berdasarkan studi yang peneliti ambil maka fokus penelitian lebih kepada bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi *enabling*, yaitu menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output. *Protecting*, yaitu melindungi usaha mikro dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

a. *Enabling*

Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:42) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang pertama adalah *enabling* yaitu menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan iklim tersebut memberikan pelatihan dalam dua tahap yaitu pelatihan praktik dan pemberian materi. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fifi selaku staff bidang usaha mikro sebagai berikut::

“Pelatihan yang kami adakan kami utamakan bagi wirausaha pemula maupun para individu yang ingin memiliki usaha sendiri ataupun anggota paguyuban, biar merata ya kami dahulukan yang belum pernah mengikuti pelatihan sama sekali. Orang luar kalau mau ikut ya bisa tinggal daftar saja di kantor. Pelatihannya itu kami membagi pelatihan kedalam dua tahap yaitu pelatihan praktik dan materi. Tidak hanya praktik keterampilan, sebuah usaha harus paham bagaimana caranya mengelola usaha yang baik. Tidak hanya dari segi pengelolaan usaha, kami juga memberi materi mengenai bagaimana cara untuk memperoleh izin usaha dan sebagainya. Pelaksanaan pelatihan tersebut dibagi kedalam tiga hari dimana hari pertama untuk teori dan hari kedua dan ketiga untuk praktiknya. Diharapkan para pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan baik serta bagi masyarakat yang belum memiliki usaha dapat segera memiliki usaha mereka.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Berikut adalah dokumentasi pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang:



Gambar 8. Dokumentasi Pelatihan Olahan Berbasis Inovasi

Sumber : Dokumentasi pribadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah membuat Ibu Kunarsih sebagai salah satu ketua pemimpin paguyuban Kube Republik Arema bergerak untuk membuat usaha minuman sari apel. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Kunarsih pada:

“Dulu awalnya saya kerja mbak di pabrik, abis itu saya keluar trus saya bingung mau kerja apa. Iseng ikut pelatihan-pelatihan gitu eh saya tertarik jadi saya tekuni. Saya awalnya ikut pelatihan di kampus Universitas Brawijaya diajarin banyak mbak. Awalnya saya coba rajut gitu, sempet udah bikin tas 10 biji. Tapi saya mikir lagi, orang kalau ngga punya uang sisa gak bakalan beli tas. Akhirnya saya ikut pelatihan yang diselenggarakan sama dinas koperasi waktu itu pelatihan minuman olahan buah. Habis dari pelatihan itu saya mikir kan kalau minuman olahan buah pasti orang mau, akhirnya saya memutuskan untuk bikin Sari apel nyontoh caranya dari yang pelatihan dari Dinas Koperasi itu. Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah berjalan empat tahun.” (Wawancara tanggal 25 februari pukul 10:00 WIB di kediamannya)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat menciptakan iklim yang bisa mendorong untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, salah satunya adalah pelatihan pembuatan olahan minuman buah yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Berikut adalah salah satu sertifikat Ibu Kunarsih saat mengikuti pelatihan bimbingan teknis pemasaran produk Usaha Mikro:



Gambar 9. Dokumentasi Sertifikat Bimbingan Teknis Pemasaran Produk Usaha Mikro

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Pelatihan tersebut dapat menggerakkan Ibu Kunarsih tidak menjadi pengangguran setelah tidak bekerja di pabrik dan menjadi salah satu peserta pelatihan untuk menciptakan usahanya sendiri. Tidak hanya ikut pelatihan Ibu Kunarsih juga melatih orang sekitar seperti tetangga karena keahliannya seperti yang dikatakan dalam wawancara bahwa:

“saya juga biasanya ngajarin tetangga gitu mbak, nanti kadang mereka suka bayar ke saya, karna saya kan juga sudah uji keahlian udah punya sertifikatnya, bikin standar produksi, pembukuan saya juga alhamdulillah sudah bisa” (Wawancara tanggal 25 februari pukul 10:00 WIB di kediamannya)

Pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Ibu Kunarsih juga bisa mengatasi angka pengangguran. Karena dari pelatihan yang diajarkan Ibu Kunarsih sendiri bisa menghasilkan usaha baru untuk orang lain.

b. Empowering

Proses pemberdayaan masyarakat yang kedua adalah *empowering*, yang dimaksud dengan *empowering* menurut Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:42) adalah membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output. Pasar input adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi seperti faktor produksi tenaga kerja, alam, modal dan kewirausahaan. Sedangkan pasar output adalah pasar yang memperjual belikan hasil dari kegiatan produksi yaitu barang dan jasa.

Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menciptakan proses pemberdayaan *empowering* diantaranya adalah membuka Klinik Bisnis untuk memberikan masukan terhadap permasalahan yang mereka hadapi kepada para pelaku usaha. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Fifi selaku Staff bidang Usaha Mikro sebagai berikut:

“Kebetulan kita ada program Klinik Bisnis, Klinik Bisnis itu disini gunanya memberikan pembinaan bagi para pelaku usaha, apalagi usaha yang baru menjadi pemula. Sebagai pelaku wirausaha baru pasti UKM banyak mengalami kesulitan, mengenai kemasannya harus seperti apa biar sampe terkenal Klinik Bisnis tersedia tidak hanya untuk memberikan pembinaan, namun juga konsultasi untuk pemasaran usahanya. Klinik Bisnis ada di hari Selasa dan Kamis.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Berikut ini adalah pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu Klinik Bisnis:



Gambar 10. Dokumentasi Klinik Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

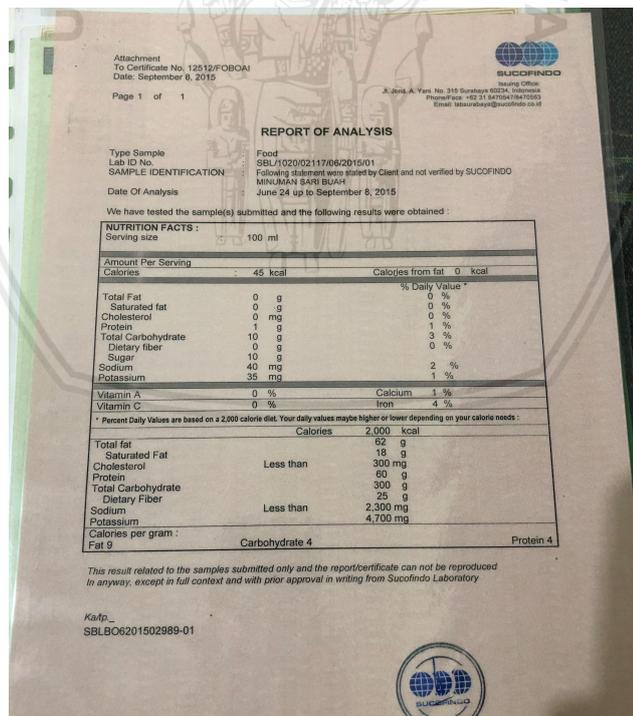
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Selain menyediakan Klinik Bisnis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memberikan fasilitasi berupa pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Nutrition Facts, dan pemberian label halal pada produk makanan maupun minuman serta sosialisasi untuk mengurus ketiganya ataupun untuk

mendapatkan izin usaha. Fungsi dari ketiganya dijelaskan melalui wawancara pada hari yang sama dengan Ibu Fifi sebagai berikut:

“Apabila satu produk usaha telah memiliki HKI misalnya, itu dapat memperkuat daya saing dari produknya, kalau sudah punya HKI kan sudah paten ibaratnya produknya sudah punya nama, jadi bisa meningkatkan mutu dari produknya itu sendiri. Sari Apel Arya usahanya Ibu Kunarsih itu juga sudah dipatenkan, meskipun itu hanya usaha kecil namun bisa meningkatkan mutu dari produknya yang akan berguna bagi jangka panjang apalagi kalau usahanya sudah besar terutama untuk ekspor misalnya.”
(Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Berikut adalah sertifikasi HKI milik Ibu Kunarsih:



Gambar 11. Dokumentasi Sertifikat HKI Milik Usaha Mikro Arya

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga membuka akses peluang usaha melalui Display UKM yang diselenggarakan dalam kota maupun luar kota. Display UKM bertujuan untuk mempromosikan produk-produk dari seluruh UKM yang ada, tidak hanya menghimpun UKM namun juga mendatangkan masyarakat yang potensial untuk menjadi pembeli. Lebih lanjut mengenai Display UKM dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut:

“Bagi UKM yang ingin mengikuti acara Display UKM akan kami seleksi dulu mbak, biasanya dari packaging dan produknya, sebisa mungkin apabila produk yang dimiliki oleh UKM tersebut mudah rusak maka packagingnya harus bisa menghindari kerusakan tersebut, kalau rusak kan jadi nggak menarik nanti nggak laku di pameran. Hasil dari display UKM biasanya lumayan mbak, ada memang UKM-UKM yang diikuti sertakan jadi mendapatkan konsumen dari luar kota. Nah nanti untuk packaging kita juga bisa diajari di Klinik Bisnis itu mbak jadi nanti ada caranya bagaimana packaging yang benar” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:45 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah mengirimkan usaha-usaha mikro ke berbagai acara display UKM yang tidak hanya diselenggarakan di Kota Malang namun juga di luar Kota Malang. Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mendatangkan pelanggan dengan cara mendaftarkan anggota binaannya ke display UKM cukup membuahkan hasil untuk membuka potensi pasar, hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Kunarsih pemilik Sari Apel

Arya mengatakan:

“Saya pernah ikut yang di Batam waktu itu, difasilitasi hotel, transport, dsb. Dari pameran itu lumayan mbak produk saya banyak yang mau, ada orang Malaysia juga pernah beli di tempat saya mbak. Selain itu saya juga beberapa kali ekspor ke Jakarta juga loh. Tapi yang terakhir saya ikuti di Batu kemaren mba bulan desember.”
(Wawancara tanggal 25 februari pukul 11:00 WIB di kediamannya)

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mendatangkan pembeli selain menyelenggarakan *Display* UKM juga memperbolehkan produk dari usaha-usaha mikro binaannya untuk meletakkan produknya serta kartu nama di Galeri UKM yang disediakan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Mengenai Galeri UKM tersebut dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut:

“Kita juga memiliki Galeri UKM bagi usaha mikro untuk meletakkan barang dagangannya disini mbak. Kalau mbak lihat waktu baru masuk kan disebelah kiri itu ada tempat isinya banyak barang-barang kan, ada kerajinan tangan segala macem, itu produk- produk usaha mikro binaan kami itu mbak. Yang kesini kan bermacam-macam orang ya, jadi mereka juga bisa lihat-lihat siapa tau tertarik sama produknya. Di mejanya itu juga ada kartu nama yang punya usaha mikro itu mbak, boleh diambil jadi kalau mau menghubungi usahanya gampang. Kalau mau beli sedikit ya tinggal ambil, kalau mau banyak ya tinggal menghubungi usahanya saja kan ada kartu namanya.”
(Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11:00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Ibu Kunarsih pemilik usaha sari apel Arya sebagai usaha mikro yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Malang juga meletakkan produk sari apelnnya di Galeri UKM milik DINKOP tersebut. Hal ini diperjelas dalam wawancara berikut:

“Iya aku juga naro produkku di Galeri UKM itu, nanti kalau sudah habis ditelfon dikasih tahu supaya naro produk lagi disitu. Aku baru naro lagi Selasa kemarin mbak, sistemnya ya bayar 10% pajak gitu ya ke DINKOP, jadi hargaaku yang disitu ya aku naikkan 10%” (Wawancara tanggal 25 februari pukul 11:00 WIB di kediamannya)

Berikut adalah Galeri UKM yang ada di ruangan depan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang:



Gambar 12. Dokumentasi Galeri UKM

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam proses pemberdayaan masyarakat *empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar *input* dan *output* dilakukan melalui

adanya Klinik Bisnis untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan pasar *input* dan pasar *output*. Bagi para masyarakat yang belum bekerja dengan adanya Klinik Bisnis tersebut bisa merintis pekerjaannya dalam bidang Usaha Mikro dan akan mengurangi tingkat pengangguran.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan kapasitas dari produk usaha binaannya memberikan fasilitasi berupa pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *Nutrition Facts* dan label halal serta sosialisasi mengenai cara mengurus ketiganya serta perizinan lain. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang juga menyediakan Galeri UKM bagi usaha mikro untuk meletakkan produknya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang serta memfasilitasi anggota binaannya untuk mengikuti display UKM tidak hanya di dalam kota atau yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu sendiri namun juga di luar kota dengan harapan dapat membuka peluang pasar melalui Galeri UKM dan pameran atau display UKM.

c. *Protecting*

Proses pemberdayaan yang terakhir menurut Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:44) adalah *protecting* yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi

masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi adalah memantau para pelaku usaha mikro tersebut, lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha sebagai berikut:

“Untuk melindungi usaha mikro dan mencegah persaingan yang tidak seimbang atau kecurangan-kecurangan kami memantau dari perbedaan-perbedaan setiap usaha yang mereka miliki untuk saling mengisi dan melengkapi. Tapi untuk pengambilan merek yang sudah ada atau nama yang sudah ada itu nanti akan dikenakan denda mbak, seperti meniru ya seperti kw-an lah” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 13:00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memantau perbedaan seperti kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu usaha dengan usaha lainnya sehingga dari kelebihan-kelebihan tersebut bisa mengisi kekurangan yang dimiliki usaha lainnya. Berikut adalah sertifikasi merek yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:



Gambar 13. Dokumentasi Sertifikat Merek Milik Usaha Mikro Sari Apel Arya

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2019

Untuk mengisi kekurangan tersebut dijelaskan kembali oleh Ibu Fifi selaku Staff bidang Usaha Mikro sebagai berikut:

“Bentuk protecting yang kami lakukan yaitu memantau perbedaan tiap usaha mbak, jadi kalau ada yang usahanya sama tapi yang satu lebih bagus misalnya dari packagingnya nanti diberi tahu kepada usaha mikro lainnya sehingga saling belajar.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 13:30 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Ibu Kunarsih sebagai pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang minuman memiliki banyak saingan usaha mikro yang menjual minuman serupa, namun baik Ibu Kunarsih dengan usaha lainnya tidak menganggap hal tersebut sebagai persaingan yang dijelaskan sebagai berikut:

“Ya saya ada teman yang jual sari apel yang sama mbak, tapi ya kami saling sharing kalau produk ini kurang apa gitu ya kita sharing karena memang diajarkan seperti itu

dan juga tiap produk sudah ada pasarnya masing-masing.” (Wawancara tanggal 25 februari pukul 12:00 WIB di kediamannya)

Bagi usaha mikro yang memiliki kekurangan tidak hanya sharing dengan sesama pelaku usaha namun juga pada Klinik Bisnis yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Klinik Bisnis yang tersedia dapat dijadikan tempat konsultasi mengenai kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suatu usaha yang dijelaskan oleh Ibu Fifi selaku Staff bidang Usaha Mikro sebagai berikut:

“Supaya tidak ada persaingan yang tidak seimbang Klinik Bisnis juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Misalnya mereka nggak bisa marketing, ya bisa tanya kesitu.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 13:35 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Mengenai upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam mencegah persaingan yang tidak seimbang juga diperjelas oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha bidang Usaha Mikro sebagai berikut:

“Kalau masalah persaingan itu ya kami hanya memantau saja, bersaing kan ya gapapa asalkan tidak aneh-aneh gitu ya mbak. Persaingan itu kan sebenarnya sudah urusan luar ya mbak, dari kami tidak ada program atau kegiatan khusus untuk proteksi itu, hanya ya memantau itu saja. Tapi beda lagi dengan meniru nama merek yang sudah ada, yang tadi saya sudah jelaskan” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 13:45 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan pada para pelaku usaha mikro serta memfasilitasi Klinik Bisnis untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh usaha mikro sehingga dapat bersaing dengan usaha lainnya. Namun pada dasarnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tidak memiliki program atau kegiatan khusus sebagai proteksi atau untuk melindungi usaha mikro dari usaha yang tidak seimbang. Melainkan denda bagi para usaha yang meniru “nama” usaha yang sudah ada sebelumnya.

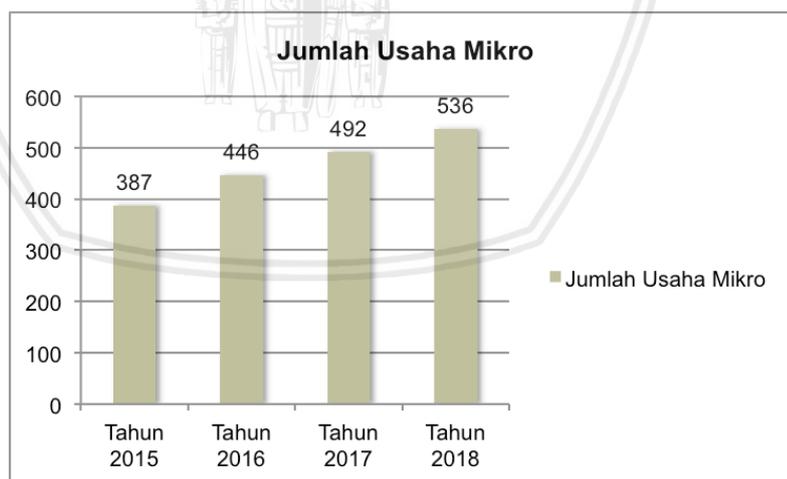
2. Dampak pemberdayaan usaha mikro dalam mengurangi tingkat pengangguran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam memberdayakan usaha mikro untuk mengurangi tingkat pengangguran memiliki dampak yang mempengaruhi usaha tersebut. Adapun dampak pemberdayaan usaha mikro dalam pengembangan usaha mikro untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah:

a. Peningkatan *Knowledge*

Berdasarkan tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) yaitu salah satunya adalah perbaikan pendidikan

dalam penelitian ini adanya peningkatan pengetahuan terkait pemberdayaan usaha mikro dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Dampak yang dirasakan oleh para tenaga kerja usaha mikro adalah dengan adanya peningkatan pengetahuan yang semakin meningkat. Sebelumnya, masyarakat tidak mempunyai pengetahuan tentang usaha mikro namun, semenjak diadakan seminar atau pelatihan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang masyarakat mempunyai pengetahuan yang lebih terbuka. Dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat semakin meningkat yaitu dengan adanya jumlah usaha mikro yang setiap tahunnya meningkat. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan yang dialami oleh Usaha Mikro Kota Malang :



Gambar 14. Jumlah Usaha Mikro

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019

Salah satu dampak dalam pengembangan usaha mikro melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengurangi tingkat

pengangguran di Kota Malang adalah peningkatan pengetahuan yang berpotensi meningkatkan jumlah usaha mikro. Pada tahun 2015 ada 387 usaha, tahun 2016 ada 446 usaha, tahun 2017 ada 492 usaha dan pada tahun 2018 ada 536 usaha. Terjadi kenaikan pada usaha mikro di setiap tahunnya yang membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mampu memberdayakan usaha mikro sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan usaha mikro setiap tahunnya diperjelas oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut:

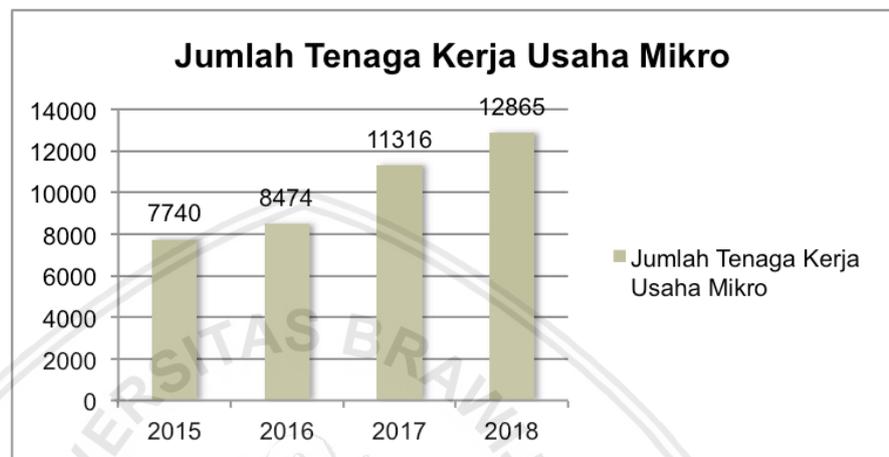
“Iya mbak pasti naik setiap tahunnya, satu tahun aja bisa berpuluh-puluh usaha mikro yang nambah ya bisalah mbak pengangguran diatasi oleh usaha mikro kan tiap tahunnya juga mengalami kenaikan” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:15 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dari hasil wawancara diatas dengan adanya peningkatan pengetahuan yang mempengaruhi kenaikan usaha mikro memberi dampak pada sebagian orang untuk memulai usaha dan bisa menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran.

b. Peningkatan *Capacity*

Berdasarkan tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) yaitu selain perbaikan pendidikan yaitu perbaikan pendapatan. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan pendapatan yang disebabkan oleh

meningkatnya kapasitas daya serap tenaga kerja usaha mikro. Berikut adalah gambar jumlah tenaga kerja usaha mikro di Kota Malang:

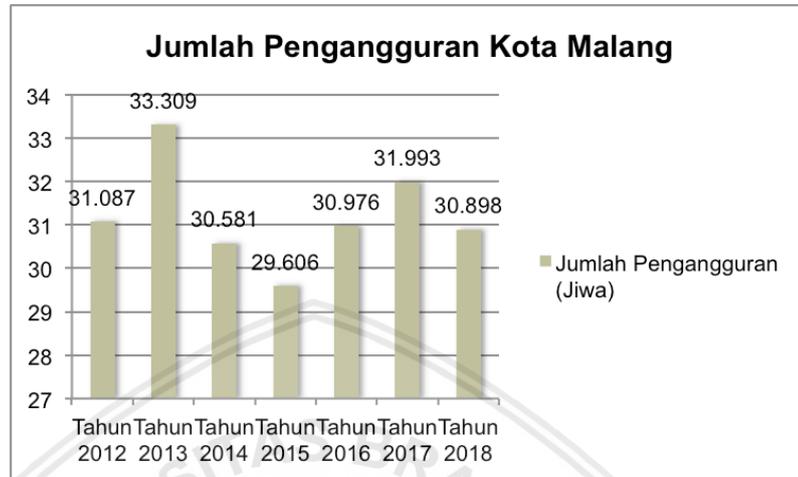


Gambar 15. Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Kota Malang

Sumber: BPS, 2019

Dengan adanya kenaikan usaha mikro berdampak juga pada kenaikan jumlah tenaga kerja usaha mikro di Kota Malang. Tahun 2015 jumlah tenaga kerja sebanyak 377.329 jiwa dan meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2018 sebanyak 423.951 jiwa. Kenaikan jumlah tenaga kerja ini membuktikan bahwa kenaikan yang dialami oleh jumlah usaha mikro berdampak pada kenaikan jumlah tenaga kerja. Dalam hal ini usaha mikro bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja usaha mikro setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan selaras dengan penurunan jumlah pengangguran pada tahun 2018. Berikut adalah gambar yang sudah diolah oleh BPS jumlah

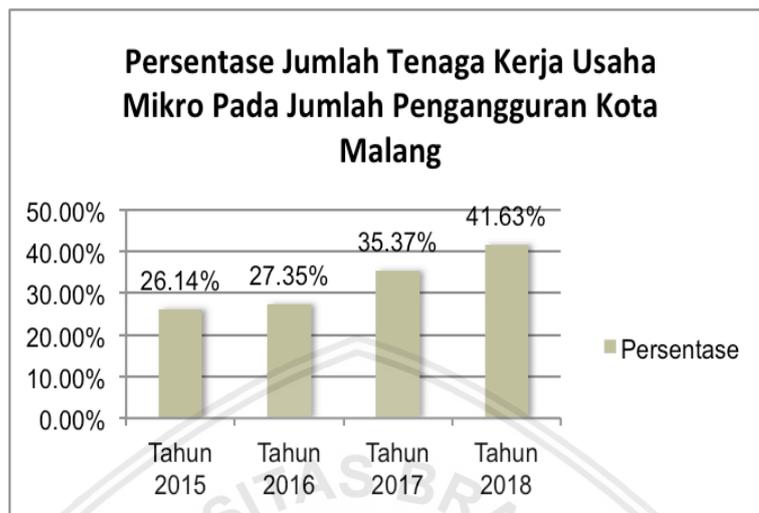
pengangguran Kota Malang:



Gambar 16. Jumlah Pengangguran Kota Malang

Sumber : BPS, 2019

Persentase yang berhasil diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa tenaga kerja usaha mikro selaras pada jumlah pengangguran Kota Malang yaitu meningkat di setiap tahunnya. Tahun 2015 sebesar 26,14% tenaga kerja , tahun 2016 sebesar 27,35% tenaga kerja, tahun 2017 sebesar 35,37% tenaga kerja dan tahun 2018 sebesar 41,63% tenaga kerja. Berikut adalah persentase jumlah tenaga kerja usaha mikro pada pengangguran Kota Malang:



Gambar 17. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Pada Jumlah Pengangguran Kota Malang

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2019

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri selaku Kepala Seksi

Perlindungan Usaha sebagai berikut:

“Iya mbak ngaruh juga tenaga kerja usaha mikro untuk mengatasi pengangguran, tenaga kerja dalam satu usaha mikro itu juga berjumlah 5 sampai 19 orang jadi menurut saya dari tenaga kerja dalam satu usaha membantu untuk menurunkan tingkat pengangguran. Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga kan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu salah satunya dengan mereka yang tidak punya usaha kita ajak pelatihan, klinik bisnis, dan membuat paguyuban” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:45 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Diperjelas oleh Ibu Kunarsih selaku ketua paguyuban usaha

mikro Kube Republik Arema sebagai berikut:

“Iya mbak paguyubanku dibawahnya ada 50an usaha mikro. Menurut saya ngaruh mbak untuk mengurangi pengangguran, walaupun usaha mikro ya kecil gini saya juga kan punya pegawai. Usaha mikro dibawah saya juga pasti punya pegawai.” (Wawancara pada tanggal 25

Februari pukul 12:00 WIB di kediamannya)

Dari hasil wawancara diatas bahwa tenaga kerja usaha mikro juga berdampak besar pada peningkatan kapasitas jika usaha mikro semakin banyak karena tenaga kerja sangat dibutuhkan. Dalam satu usaha mikro tidak hanya satu tenaga kerja, bisa lebih dari satu jika dijumlahkan satu paguyuban bisa menghasilkan banyak tenaga kerja.

c. Peningkatan *Independency*

Berdasarkan tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) yaitu adanya perbaikan pendidikan yang mempengaruhi peningkatan dalam usaha mikro kemudian perbaikan pendapatan yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja dan dalam penelitian ini adanya peningkatan kemandirian yang berpengaruh pada perbaikan kehidupan. Perbaikan kehidupan menurut Mardikanto artinya dengan tingkat pendapatan, dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Pelatihan dan Klinik Bisnis yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan adanya paguyuban UKM. Untuk mempermudah persebaran informasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang kepada usaha mikro yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

yaitu adanya paguyuban UKM.. Berikut adalah daftar paguyuban UKM yang ada di Kota Malang:

Tabel 1. Daftar Nama Paguyuban UKM Kota Malang

No	NAMA PAGUYUBAN	KETUA PAGUYUBAN
1	AMR (Asosialisasi Malang Raya)/ AMK (Andalan Malang Kreatif)	Pak Eko Srilaksono
2	Amangtiwi	Bu May
3	Komunitas Rajut Malang (KRM)	Bu Dini
4	Preman Super	Bu Ida
5	APKM (Asosiasi Perajin Kota Malang)	Bu Retno
6	MCF (Malang Creative Fusion)	Vicky
7	A2KM (Ajang Apresiasi Koelinar Malang)	Pak Berni
8	Komunitas Gerabah	Pak Jatmiko
9	Komunitas Keramik	Pak Syamsul
10	Khasmara (Khazanah Malang raya)	Bu Pudji Rahayu
11	Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI)	Bu Wati Bu Yuyun
12	Kube Republik Arema	Bu Kunarsih
13	Paguyuban BSM	Bu Tika
14	Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI)	Bu Andriani
15	Perca Malang Raya	Bu Ortin
16	Sentral Kue Basah	Bu Herni
17	Himpunan Pengusaha Nadliyin (HPN)	Pak Bambang
18	Wicesa Ayu	Pengurus (Bu Ely)
19	WAKAZI	Bu Nur Hamidah
20	Berlian	Bu Novita
21	Paguyuban Ngalam Mandiri (Binaan Rumah Zakat)	Yohanes Wahyudi
22	UHAME (Usaha Halal Memang Sukses)	Elia Yuni T

NO	NAMA PAGUYUBAN	KETUA PAGUYUBAN
23	Bianglala	Henny Anisa., S.Psi
24	Persadir Malang Raya	Ida Rachmawati
25	(JMB) Jendela Maju Bersama	Slamet Ribandoko
26	(IFC) Indonesia Fasion Chamber	Belinda
27	(AKI) Aku Kuliner Indonesia	Bu Ely Pak Soim
28	Paguyuban Keripik Tempe Sanan	Bu Endang
29	Paguyuban Rumah Baking (RBI)	Selvy Margaretha Rachel Ira Sophia Iryani Hajijah

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, 2019

Adanya paguyuban-paguyuban yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang selain mempermudah pihak Dinas untuk memberikan persebaran informasi, paguyuban- paguyuban tersebut juga membantu untuk saling memberdayakan satu sama lain. Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sri Selaku Kepala Seksi Perlindungan Usaha Mikro sebagai berikut:

“Paguyuban UKM yang terdiri dari beberapa UKM tersebut diantaranya paguyuban Amangtiwi, Komunitas Rajut Malang, APKM, dan lain-lain. Kube Arema Malang yang diketuai oleh Ibu Kunarsih itu juga masuk sebagai paguyuban UKM dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Paguyuban-paguyuban tersebut sudah terbentuk terlebih dahulu baru didaftarkan ke Dinkop. Paguyuban-paguyuban tersebut juga membantu pemberdayaan didalam masyarakat itu sendiri, biasanya mereka juga saling memberdayakan. Mereka bisa saling kerjasama dalam hal pemasaran, misalnya. Paguyuban-paguyuban tersebut dapat membuat mereka lebih kreatif dan inovatif karena didalam paguyuban-paguyuban tersebut kadang ada pelatihan bagi

anggota mereka.” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14:30 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah usaha mikro merupakan salah satu dampak mengenai kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Malang.

C. Analisis Data Fokus

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai salah satu alternatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Suatu kegiatan pemberdayaan pada dasarnya memiliki proses pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Menurut menurut Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:42-44) terdapat tiga hal pokok dalam proses pemberdayaan masyarakat:

a. *Enabling*

Enabling berarti menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang guna menciptakan iklim tersebut mengadakan

pelatihan bagi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Pelatihan yang diselenggarakan selama 2 hingga 3 hari tersebut terdiri dari dua tahap yaitu pelatihan dari segi praktik keterampilan dan materi. Pada hari pertama para peserta pelatihan akan diberikan materi mengenai manajemen usaha, kemudian pada hari kedua dan ketiga akan diberikan pelatihan secara praktik. Beberapa pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yaitu pelatihan sablon, olah makanan, kain perca, sulam pita, dan merangkai bunga kering. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang ditujukan bagi wirausaha pemula sudah tergabung dalam paguyuban yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dan juga masyarakat yang ingin memiliki usaha meskipun belum terdaftar.

Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk menciptakan iklim yang dapat mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mengembangkan potensi yang ada tersebut membuat Ibu Kunarsih sebagai salah satu anggota paguyuban Kube Arema Malang pada waktu itu tergerak untuk menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Ibu Kunarsih yang awalnya tidak memiliki usaha, terdorong dan termotivasi untuk mendirikan usahanya sendiri setelah mengikuti pelatihan olah makanan yang

diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Hal ini sesuai dengan proses pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu *enabling*; menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.

Menurut Sukirno (2008) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Dengan demikian, pelatihan yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang membuat para penganggur yang sebelumnya tidak mempunyai usaha atau tidak bekerja kini mereka bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan melalui pelatihan usaha mikro dan menciptakan produk sendiri.

b. *Empowering*

Proses pemberdayaan masyarakat yang kedua menurut Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:42)) adalah *empowering* yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang

meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output. Pasar input yang dimaksud adalah pasar yang memperjual belikan faktor-faktor produksi seperti faktor produksi tenaga kerja, alam, modal dan kewirausahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar output adalah pasar yang memperjual belikan hasil dari kegiatan produksi yaitu barang dan jasa.

Untuk menciptakan iklim tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuka Klinik Bisnis yang memiliki fungsi untuk memberikan masukan bagi permasalahan yang berkaitan dengan pasar input dan pasar output yang dihadapi oleh usaha mikro terutama wirausaha pemula. Para pelaku usaha tersebut bisa datang pada waktu yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk bertemu dengan seseorang yang ahli di bidang wirausaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan pasar input maupun pasar output, sehingga usaha-usaha tersebut dapat memecahkan masalahnya dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan pelaku usaha tersebut. Klinik Bisnis merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan iklim *empowering* yaitu penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output.

Selain pemberian fasilitasi berupa Klinik Bisnis, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menciptakan iklim *empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki melalui pemberian fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Nutrition Facts, atau label halal secara gratis untuk meningkatkan mutu dari produk itu sendiri sehingga hasil produksi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki daya saing sebagai upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki. Untuk membuka akses pasar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memfasilitasi bagi para usaha mikro binaannya untuk mengikuti Display UKM yang diselenggarakan di Kota Malang maupun di luar kota dan juga memperbolehkan bagi pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk meletakkan produknya di Galeri UKM yang ada di kantor dinas.

Sebelum mengikuti display UKM, produk-produk yang mendaftar display UKM diseleksi terlebih dahulu sehingga pada saat display UKM produk-produk yang dipajang memiliki daya saing daripada produk-produk lain yang berasal dari UKM-UKM kota lain. Hasil dari adanya display UKM yang diikuti Ibu Kunarsih sebagai pemilik Sari Apel Arya adalah produknya banyak dibeli ketika mengikuti pameran di Batam dan beliau beberapa kali melakukan ekspor ke Batam dan juga Jakarta dikarenakan pesanan yang datang setelah display UKM tersebut.

Selain itu, Ibu Kunarsih juga rutin meletakkan produknya di Galeri UKM dan banyak orang yang membeli produknya melalui Galeri UKM.

c. *Protecting*

Proses pemberdayaan yang terakhir menurut Brautigam dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:42) adalah *protecting* yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat. Menurut Hafsah (2004:43) menyatakan beberapa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UMKM yaitu salah satunya adalah perlindungan usaha. Jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi yang lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat melalui pemantauan kepada usaha-usaha mikro yang berada dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memantau perbedaan

yaitu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu usaha dengan usaha lainnya sehingga dari kelebihan-kelebihan tersebut bisa mengisi kekurangan yang dimiliki usaha lainnya. Kelebihan yang dimiliki suatu usaha mikro akan diajarkan kepada usaha mikro yang serupa sehingga kedua usaha tersebut dapat berkembang secara bersamaan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang juga menganjurkan kepada kedua usaha tersebut untuk saling terbuka mengenai kekurangan atau kelebihan yang dimiliki sehingga usaha tersebut dapat belajar dari satu sama lain. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang juga memfasilitasi usaha mikro untuk berkonsultasi kepada Klinik Bisnis untuk menemukan solusi mengenai kekurangan-kekurangan yang dimiliki usaha mikro tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang hanya sebatas melakukan pemantauan terhadap usaha mikro, belum ada strategi khusus dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mencegah eksploitasi atau perlindungan bagi kelompok usaha yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Kecuali denda untuk suatu usaha yang benar-benar meniru “nama” yang sudah ada sebelumnya.

2. Dampak Pemberdayaan Usaha Mikro Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran

a. Peningkatan *Knowledge*

Kenaikan jumlah usaha mikro setiap tahunnya membuktikan salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah melalui pemberdayaan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah membuat Klinik Bisnis, Display UKM, dan Paguyuban sebagai wadah masyarakat agar pemberdayaan usaha mikro berjalan dengan baik. Dengan adanya peningkatan jumlah usaha mikro setiap tahunnya membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang bisa menjadi wadah untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Mardikanto dan Soebianto (2012:111) memberi pendapat tentang tujuan pemberdayaan masyarakat yang meliputi berbagai upaya perbaikan yaitu salah satunya perbaikan pendidikan. Dalam hal ini perbaikan pendidikan berdampak kepada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pemberdayaan usaha mikro di Kota Malang. Pengetahuan yang lebih luas menjadikan masyarakat membuka lapangan pekerjaan melalui usaha mikro. Dilihat dari data bahwa jumlah usaha mikro di Kota Malang yang setiap tahun meningkat. Wilson (1996) memaparkan tahapan proses pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah kesadaran. Dengan peningkatan pengetahuan yang lebih luas menjadikan masyarakat sadar akan kemampuan dan

keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.

b. Peningkatan *Capacity*

Kenaikan jumlah tenaga kerja yang mempengaruhi peningkatan kapasitas masyarakat pada jumlah usaha mikro. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja mempengaruhi tingkat penurunan pengangguran melalui peningkatan pemberdayaan usaha mikro. Selaras dengan teori dari Partomo (2004) mengenai UMKM lebih tangguh dalam krisis yang terjadi dan salah satu keunggulannya adalah kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja. UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Jumlah tenaga kerja usaha mikro yang meningkat setiap tahunnya membuktikan bahwa usaha mikro mampu menciptakan kesempatan kerja cukup banyak dan usaha mikro mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang meningkat membuktikan bahwa peningkatan pendapatan pada masyarakat. Menurut BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Pada satu usaha mikro didalamnya terdapat tenaga 5 sampai dengan 19 orang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu

Kunarsih selaku pemilik Usaha Mikro Sari Apel Arya bahwa satu usaha mikro mempunyai tenaga kerja didalamnya. Jumlah tenaga kerja pada satu usaha mikro ini mampu mengatasi tingkat pengangguran yang terjadi.

Pemberdayaan dengan cara mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor usaha mikro memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor usaha mikro akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

c. Peningkatan *Indepedency*

Pembentukan paguyuban UKM yang dinaungi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merupakan salah satu cara pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha mikro agar mempermudah persebaran usaha mikro. Paguyuban yang telah didirikan oleh masing-masing tenaga kerja usaha mikro membuktikan bahwa masyarakat sudah mengalami peningkatan kemandirian karena sudah bisa membuat kerjasama antar bisnis.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) yaitu perbaikan kehidupan yang artinya tingka pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat

memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Kemandirian yang telah dimiliki oleh masyarakat dengan adanya Paguyuban UKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keadaan kehidupan yang lebih baik.

Hafsah (2004:43) mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu diupayakan untuk pengembangan UKM adalah perlunya memantapkan asosiasi, yaitu asosiasi yang telah ada perlu diperkuat. Pembentukan Paguyuban Amangtiwi menjadi Koperasi Amangtiwi merupakan usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk memantapkan dan menguatkan asosiasi yang ada. Pembentukan Paguyuban Amangtiwi dilakukan agar usaha yang sudah terdaftar dibawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menjadi bagian resmi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dengan adanya paguyuban tersebut memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menghitung berapa jumlah usaha mikro yang telah terdaftar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai perangkat daerah yang menaungi usaha mikro di Kota Malang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berupaya untuk mengembangkan usaha mikro melalui pemberdayaan yang menjadikan usaha mikro di Kota Malang dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran.

Pemberdayaann usaha mikro dan dampak pemberdayaan Usaha Mikro, yaitu peningkatan *knowledge*, peningkatan *capacity*, peningkatan *indepedency* sebagai salah satu alternatif dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran . Jumlah usaha mikro semakin tahun semakin meningkat membuktikan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang berhasil dalam menyelenggarakan pelatihan, display UKM, Klinik Bisnis, dan Paguyuban UKM. Jumlah tenaga kerja juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menyebabkan pengangguran semakin berkurang tiap tahunnya. Pemberdayaan usaha mikro mampu mengatasi pengangguran yang ada di Kota Malang.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang meliputi proses *enabling*,

empowering dan protecting.

a. *Enabling*, yaitu menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk memotivasi dan mendorong para pelaku usaha ataupun individu yang belum memiliki usaha untuk mengembangkan usaha mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dengan adanya pelatihan dapat menciptakan tenaga kerja baru agar bisa mengurangi pengangguran.

b. *Empowering*, yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar input dan output. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuka Klinik Bisnis yang memiliki fungsi untuk memberikan masukan bagi permasalahan yang berkaitan dengan pasar input dan pasar output yang dihadapi oleh usaha mikro terutama wirausaha pemula. Selain pemberian fasilitasi berupa Klinik Bisnis, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang menciptakan iklim *empowering* yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki melalui pemberian fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Nutrition Facts, atau label halal secara gratis untuk meningkatkan mutu dari produk itu sendiri sehingga hasil

produksi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki daya saing sebagai upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki. Untuk membuka akses pasar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memfasilitasi bagi para usaha mikro binaannya untuk mengikuti Display UKM yang diselenggarakan di Kota Malang maupun di luar kota dan juga memperbolehkan bagi pelaku usaha binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang untuk meletakkan produknya di showroom yang ada di kantor dinas.

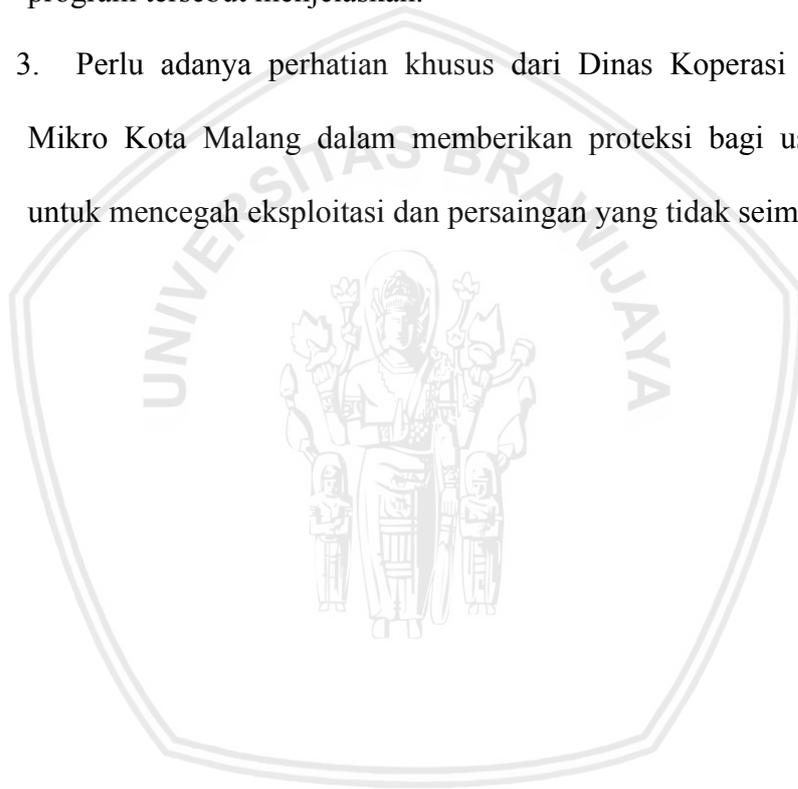
c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktik eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memantau perbedaan yaitu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu usaha dengan usaha lainnya sehingga dari kelebihan-kelebihan tersebut bisa mengisi kekurangan yang dimiliki usaha lainnya. Kelebihan yang dimiliki suatu usaha mikro akan diajarkan kepada usaha mikro yang serupa sehingga kedua usaha tersebut dapat berkembang secara bersamaan

B. Saran

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebaiknya melakukan pendataan mengenai usaha mikro dan melakukan identifikasi mengenai berdaya atau tidaknya usaha-usaha tersebut sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kota Malang dapat merata dan tepat sasaran.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebaiknya lebih memantau untuk semua peserta yang mengikuti program Klinik Bisnis, karena tidak semua peserta yang mengikuti Klinik Bisnis tersebut dapat menjalankan usahanya sesuai petunjuk saat narasumber di program tersebut menjelaskan.
3. Perlu adanya perhatian khusus dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam memberikan proteksi bagi usaha mikro untuk mencegah eksploitasi dan persaingan yang tidak seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Tahun 2017 Kota Malang. Diakses pada tanggal 5 November 2018. <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2015/03/20/466/Jumlah-angkatan-kerja-penduduk-bekerja-pengangguran-tpak-dan-tpt-2006-2014.html>
- Badan Pusat Statistik Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/10/29/1324/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2010-2016-dan-2017.html>
- Cook, Sarah and Macaulay, Steve. 1997. *Perfect Empowerment (Pemberdayaan yang Tepat)*, edisi terjemahan, alih bahasa: Ploepi Tyas R. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Darwanto. 2013. Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi Dan Kreativitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan Kreativitas) Jurnal bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.20 No.02. Hal 142-149.
- Depdiknas (2003) Media Pembelajaran. Jakarta : Depdiknas.
- Fahrudin, Adi. 2011. Pemberdayaan, Partisipasi dan, Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung : Humaniora utama.
- Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty.
- Ginanjari, Kartasasmita. 1997. Kemiskinan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafsah, Muhammad Jaffar. 2004. *Upaya pengemban Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun XXX:40,44.
- Indradi, Samsiar Syamsuddin. 2006. Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang. Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Jayampathi. Kaushalya. 2018. Relationship between microfinance and economic empowerment of women entrepreneurs in Matara District, Sri Lanka: *International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability*. Vol.03, No.01

- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta:Gavamedia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi.
- Lestari, Sri, 2018. Diakses pada tanggal 8 November 2018. <http://surabaya.tribunnews.com/2018/06/22/kontribusi-umkm-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-jatim-diklaim-terus-tumbuh-positif>
- Mankiw, N. Gregory, 2007, Teori Makroekonomi, terjemahan edisi ke tujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Qalyubi, Syihabuddin dkk. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Partomo, Titik S. 2004. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Vol. No. 9
- Prasodjo, Eko. 2004. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Rachmat, Budi. 2005. *Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2008. Makroekonomi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saputro. J.W., Handayani., Putu Wuri., Hidayanto, Achmad Nizar., dan Budi, Indra. 2010. Peta rencana (ROADMAP) Riset Enterprise Resource Planning (ERP) dengan fokus riset pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Journal of information system. Vol.06 No.02.
- Silviana, Septinia Eka. 2012. *Perjalanan Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) hingga New public Service (NPS)*.
- Suci, Yuli Rahmani. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 06 No. 01. Hal. 52.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan r&D. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Edisi Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Suryono , Agus , dan Trilaksono. 2007. *Paradigma, Model, dan Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi UNIBRAW
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wilson, Terry ., 1996. *The Empowerment Manual*, Grower Publishing Company, London.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Gambar 18. Foto Wawancara dengan Ibu Fifi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2019



Gambar 19. Foto Wawancara dengan Ibu Sri Wedarti di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2019



Gambar 20. Foto setelah Wawancara dengan Ibu Kunarsih di Kediannya
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2019



Gambar 21. Foto saat mengikuti Klinik Bisnis di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2019

Lampiran 2. Surat Riset



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~1297~~/UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada Yth. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Reva Alfiana Annisa W
Alamat : Jalan Bunga Kumis Kucing No. 16 RT 05 RW 02, Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, 65141
NIM : 155030107111018
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran
Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang
Waktu : Februari 2019 s/d April 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 30 Januari 2019

Dekan

Jurusan Administrasi Publik



Drs. Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 000

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

Lampiran 3. Interview Guide

Fokus	Pertanyaan
1. a. Enabling (Mengembangkan)	1. Bagaimanakah pertumbuhan Usaha Mikro di Kota Malang?
	2. Adakah pelatihan khusus untuk Usaha Mikro yang baru terdaftar?
	3. Bagaimanakah cara Dinas Koperasi untuk mengembangkan dan menciptakan suatu iklim yang memotivasi dalam pemanfaatan sumberdaya Usaha Mikro di Kota Malang?
b. Empowering (Memberdayakan)	1. Berapakah tenaga kerja yang diserap oleh Usaha Mikro di Kota Malang setiap tahunnya?
	2. Apakah pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Malang mempengaruhi tingkat pengangguran?
	3. Bagaimanakah peran pemerintah Kota Malang dalam mengurangi tingkat pengangguran melalui pemberdayaan Usaha Mikro?
c. Protecting (Melindungi)	1. Adakah perlindungan yang dimiliki Dinas Koperasi untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang?
	2. Bagaimanakah cara Dinas Koperasi mengatasi persaingan Usaha Mikro yang menjual hal serupa?
2. Dampak	1. ada berapakah jumlah usaha mikro setiap tahunnya?
	2. ada berapakah jumlah tenaga kerja usaha mikro setiap tahunnya?

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Reva Alfiana Annisa W
 Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 22 Februari 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Jl. Bunga Kumis Kucing No.16,
 Lowokwaru, Malang.
 Alamat Asal : Jl. Tapir VI No.29 RT06/RW10
 Cikarang Pusat, Bekasi
 NIM : 155030107111018
 Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi/Administrasi
 Publik
 Nomor Telepon : 081285177796
 Email : reva.alfiana@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	SDI ANNUR	2003-2009
2	SMPIT ALBINAA	2010-2012
3	SMAN 1 Cikarang Pusat	2013-2015
4	S-1 Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2016-2019